

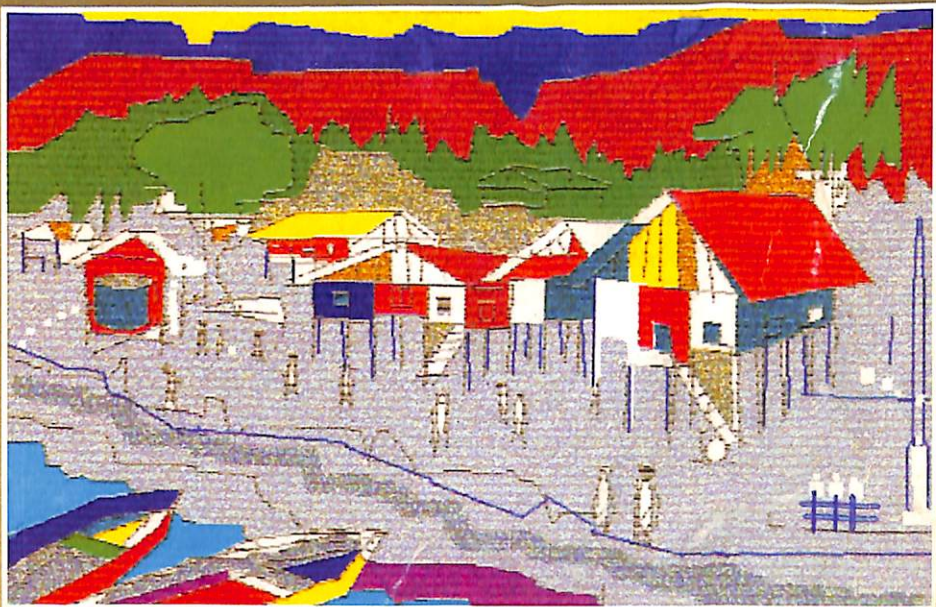


ISSN : 1410 - 3877



Buletin

Haba



ai Pelestarian
ai Tradisional

Kehidupan Masyarakat Gampong/Desa

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

2000 **15**

H a b a

informasi kesejarahan
dan nilai tradisional

No. 15 Th. III
Edisi Juli-September 2000

PELINDUNG

Direktur Jenderal Kebudayaan
Kakanwil Depdiknas Provinsi DI Aceh

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

PENASIHAT AHLI

M. Hakim Nyak Pha
Rusdi Sufi
Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA

Agus Budi Wibowo
Irin Dewati Wanti
Indriani
Sri Wahyuni

DEWAN REDAKSI

Seno
Irvan Setiawan
Sri Waryanti
Elita Batara Munti
Titit Lestari
Hasimi
Sudirman

SEKRETARIAT

Djuniat
Makmun Abdullah
Yulhanis
M. Saleh
Azizah
Cut Nadia Fitriana
M. Jamiil

ALAMAT REDAKSI

Jln. Tuanku. Hasyim Hanta Muda 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226. 24216
Faks. (0651) 24216

Diterbitkan oleh :

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh dari pembaca. Redaksi dapat juga menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya

ISSN : 1410 - 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info

- ♦ Dari Narkoba hingga Peradilan Rakyat

Wacana

- Sudirman. Kehidupan Sosial Ekonomi Buruh Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur Pada Abad Ke-19
- Seno. Pemerintahan *Gampong* dan Peran *Keuchik* di Aceh Besar
- Cut Nadia Fitriana. Okupasi Kerja Sektor Nelayan: Suatu Dampak Kegiatan Ke-pariwisataan Pada Masyarakat Pedesaan Iboih Sabang Aceh
- Sri Wahyuni. Industri Kecil: Usaha Menumbuhkan Kewiraswastaan Pada Masyarakat Pedesaan (Pengrajin Sulaman Kasab di Samatiga Aceh Barat)
- Titit Lestari. Dinamika Masyarakat Pedesaan Sebagai Sumber Daya Sosial Budaya

Cerita Rakyat

Haba Nyak Amat Lagak

Pustaka

Sistem Pengetahuan Kenelayan Pada Masyarakat Nelayan Aceh Besar

Cover

Iman A. Musa

Tema Haba No 16 *Kehidupan Masyarakat Kota*

DARI NARKOBA HINGGA PERADILAN RAKYAT

Narkotika dan obat terlarang atau yang lebih trend saat ini disebut dengan narkoba, bukan barang baru dalam dunia kriminologi. Dari segi kesehatan sudah jelas penggunaan obat-obat psikotropika tersebut dapat berakibat merugikan kesehatan pemakainya. Dari sudut budaya narkoba juga sebagai musuh karena bagi penggunaannya akan kehilangan kontrol dalam pengendalian diri sehingga pada masa yang akan datang kita akan kehilangan manusia yang santun, jujur dan percaya diri, yang kesemuanya ini menghilangkan identitas kita sebagai bangsa.

Namun tampaknya pelarangan saja tidak akan ampuh apabila tidak ada sanksi hukum yang tegas. Pencegahan terhadap bahaya narkoba bukan hanya menjadi tugas polisi atau penegak hukum, tetapi juga keluarga dan segenap lapisan masyarakat. Atas dasar tersebut, maka Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh sebagai lembaga pengkajian terhadap nilai-nilai budaya merasa perlu untuk mengambil bagian dalam mengantisipasi bahaya narkoba di kalangan remaja, agar tidak terjadi *lost generation*.

Salah satu caranya adalah melalui diskusi dengan mengambil tema *Dengan Pendekatan Budaya Kita Tanggulang Bersama Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja* yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2000. Diskusi ini akan diikuti oleh pemuda dan pelajar yang ada di kota Medan. Para pembicara adalah dari kepolisian yang tentunya akan melihat masalah narkoba dari sudut pandang hukum, dari Departemen Kesehatan akan menyoroti masalah narkoba dari sisi kesehatan dan pakar budaya yang akan membahas permasalahan narkoba dari sisi budaya.

Dipilihnya kota Medan sebagai tempat berlangsungnya diskusi ini adalah karena alasan faktor kota Medan sebagai kota besar, yang menjadikan kota ini sangat cepat terimbas dari berbagai pengaruh negatif baik

yang datang dari kota-kota besar lainnya maupun secara langsung dari luar negeri. Selain itu juga Sumatera Utara adalah termasuk wilayah kerja BKSNT Banda Aceh yang harus tetap diperhatikan dan digali potensi budayanya. Untuk kelancaran pelaksanaan acara tersebut BKSNT Banda Aceh akan bekerja sama dengan Bidang Jarahmitra Kanwil Depdiknas Sumatera Utara.

Selanjutnya BKSNT Banda Aceh juga akan melaksanakan dialog budaya antar pemuda se-kota Banda. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengisi acara Piasan Budaya Aceh III tahun 2000 yang digelar oleh unit-unit kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Prov. D.I. Aceh dengan mengambil tema "*Peradilan Rakyat*" diharapkan dialog ini akan mengundang pembicaraan yang berkompeten dalam menanggapi masalah budaya tersebut.

Selain para siswa SLTA se-kota Banda Aceh, Mahasiswa diwakili oleh Senat Mahasiswa Fakultas masing-masing, peserta dalam dialog ini adalah beberapa Organisasi Pemuda yang ada di kota Banda Aceh. Mereka adalah anak-anak muda yang mempunyai semangat yang masih menyala-nyala dan idealis dalam menanggapi berbagai masalah sosial budaya yang sering terjadi di Aceh belakangan ini. Nara sumber adalah tokoh budaya dan praktisi hukum. Untuk mendukung acara ini BKSNT Banda Aceh akan merencanakan bekerja sama dengan FP-HAM Banda Aceh dan pakar di bidangnya.

Acara tersebut akan berlangsung pada akhir bulan Agustus 2000. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah mencari solusi bagaimana jalan terbaik dari sudut pandang budaya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan penyelesaian hukum yang selama ini sering berlangsung di masyarakat. Harapan Kepala BKSNT Banda Aceh, kedua acara tersebut dapat terlaksana dengan sukses. (IDW)

Kehidupan Sosial-Ekonomi Buruh Perkebunan Tembakau Di Sumatera Timur Pada Abad Ke-19

Oleh : Sudirman

Pendahuluan

Apabila kita membaca sejarah Indonesia, buruh atau petani menjadi obyek eksploitasi, baik oleh pemerintah kerajaan maupun pemerintah kolonial. Semenjak tahun 1800, pemerintah kolonial merubah cara eksploitasi konservatif, yang dikelola oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) menjadi eksploitasi yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Eksploitasi ini dipusatkan pada pemanfaatan faktor produksi yang sangat kaya, yaitu tanah dan tenaga kerja.

Dengan tersedianya faktor produksi tersebut, maka pemerintah kolonial mengganti tanaman tradisional (tradisional crops) dengan memperkenalkan tanaman komersial (commercial crops). Dengan diper-kenalkannya tanaman komersial, berarti masuknya pengaruh perkebunan ke pedesaan, sehingga terjadi depedensi dengan perkebunan. Para buruh menjadi sangat tergantung hidupnya pada perkebunan, apalagi dengan dimulainya proses monetisasi melalui upah kerja. Hal itu, sangat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi buruh perkebunan tersebut.

Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara) sampai pada abad ke-19 dihuni oleh kelompok etnis Melayu, Batak Karo dan Batak Simalungun. Mereka inilah yang dikenal dengan penduduk asli Sumatera Timur. Menurut Anderson, masyarakat Islam yang berbahasa Melayu tinggal di bagian sungai yang lebih ke hilir. Penduduk di daerah tersebut keturunan para imigran Melayu dari Jambi, Palembang dan Semenanjung Malaya, dan juga beberapa keturunan Minang, Bugis dan

Jawa, yang telah menetap di sepanjang pantai. Sedangkan Batak Karo dan Simalungun lebih dekat ke arah pantai.

Masyarakat Sumatera Timur pada zaman dahulu hidup dari hasil pertanian, peternakan, perikanan dan hasil hutan.¹ Pembukaan Sumatera Timur (*ostkust van Sumatra*) menjadi suatu daerah perkebunan yang luas (*cultuurgebied*) telah melibatkan kepentingan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, kesultanan maupun lembaga masyarakat desa umumnya. Keterlibatan ini terutama berpangkal pada masalah penggunaan tanah untuk kepentingan perkebunan milik swasta, yang secara adat tanah tersebut adalah milik rakyat dan penguasa.

Mengingat tanah adalah milik rakyat² dan penguasa, maka proses pengambilalihan tanah-tanah untuk kepentingan perusahaan perkebunan telah menimbulkan keresahan dalam lembaga masyarakat yang bersang-kutan, karena penguasa memberikan tanah tersebut tanpa bermusyawarah dengan para datuk sebagai kepala kampung di Sumatera Timur. Untuk keperluan perkebunan yang hasilnya sedang mendatangkan keuntungan yang besar, semua telah di impor dari luar daerah; makanan, perlengkapan, dan manusia telah dimasukkan, bukan saja dari tanah jajahan, tetapi juga dari luar tanah jajahan.

¹ John Anderson, *Mission to the East Cost of Sumatra in 1823* (New York : Oxford University, 1971), hal. 117, 279.

² Mahadi, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timur 1800-1975*. (Bandung: Alumnii, 1976).

Perbedaan status sangat penting dalam lingkungan masyarakat *planter* (orang Eropa yang bekerja di perkebunan). Tuan-tuan *administrateur* mempunyai isteri orang Eropa, sedangkan asisten kebun memelihara nyai-nyai Jawa; kedua golongan ini pun tidak dapat bercampur dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan buruh-buruh yang penuh dengan keringat membanting tulang, dengan mencangkul, menanam, memelihara tanaman di hutang-hutang di Deli, Langkat, Serdang dan sebagainya. Mereka sangat tersisih kehidupannya, baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Kurangnya perhatian terhadap buruh-buruh yang bekerja di perkebunan tersebut, menyebabkan kehidupan mereka penuh dengan kesengsaraan, karena kurangnya makan, upah yang sangat rendah, dan tempat tinggal yang tidak layak di barak-barak perkebunan. Munculnya penyakit yang merajalela, protistusi dan perjudian di perkebunan menyebabkan kehidupan mereka semakin bertambah buruk. Buruh-buruh yang bekerja di perkebunan itu seperti kuda yang dibebani dengan beban yang sangat banyak untuk menempuh perjalanan yang jauh. Namun demikian, buruh-buruh tersebut, tetap saja tidak dapat melepaskan pekerjaannya. Hal itu, disebabkan ketatnya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh "oknum-oknum" perusahaan, sehingga dalam keadaan bagaimana-napun mereka tetap "tabah" menghadapinya. Untuk itu, tulisan ini mencoba menjelaskan seluk-beluk permasalahan kehidupan buruh perkebunan di pedesaan Sumatra Timur (Sumatera Utara) pada abad ke-19.

Perkembangan Perkebunan dan Tenaga Kerja

Menurut T. Volker dalam bukunya *Van Oerbosch tot Cultuurgebeid*, kegiatan perkebunan utama di luar pulau Jawa adalah daerah pantai Sumatera Timur, yang berubah dari rimba raya menjadi tempat

perkebunan nomor satu di dunia tahun 1860-an. Sumatera Timur yang dinamakan *cultuurgebeid*, atau wilayah perkebunan di Sumatera Timur dibangun atas tiga faktor utama. *Pertama*, bahwa lahan di berbagai bagian kerajaan Melayu, seperti Deli, Serdang dan Langkat mampu menghasilkan daun tembakau pembungkus cerutu terhalus dan termahal di dunia, yang berharga hampir empat kali lipat daun tembakau Kuba dan Jawa pada tahun 1938.³ *Kedua*, Kemampuan perusahaan-perusahaan Barat untuk menandatangani fakta jangka panjang dengan raja-raja lokal, yang menjamin tersedianya lahan pertanian luas yang dapat dikendalikan selama jangka waktu yang lama, terlepas dari kepentingan penduduk setempat. *Ketiga*, terdapat sistem yang mengadakan kerja kontrak; mula-mula dari Cina, kemudian dari pulau Jawa, untuk melakukan pekerjaan perkebunan yang dianggap dijauhi oleh penduduk setempat.

Berdasarkan pertimbangan itulah industri perkebunan tembakau di Deli berhasil membangun prasarana pelayanan administrasi dan keuangan, kesenangan kota, fasilitas pengiriman barang dengan kapal, jaringan pengangkutan, yang menjadi menarik perhatian perusahaan-perusahaan yang ingin mendirikan perkebunan tanaman jenis-jenis lainnya. Lebih dari 300 perkebunan⁴ yang terpisah-pisah dengan menyewa tenaga lebih dari 500.000 orang pekerja, untuk menghasilkan komoditi ekspor di Sumatera Timur pada waktu itu.

Dari pusatnya di Medan, perkebunan Sumatra Timur menjelang tahun-tahun 1920-an luasnya yang terhampar

³ Van den Waal, *Richtlijnen voor en Ontwikkelingsplan voor de Oostkust van Sumatra* (Wageningen: Wageningen Agricultural University, 1959), hal. 38.

⁴ The Kian Wie, *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra 1863-1942* (Jakarta: National Institute of Economic and Social Research, 1977), hal. 41.

dalam rangkaian yang tidak terputus-putus sekitar 100 kilometer jauhnya ke arah batas Timur Laut dengan Aceh, 100 kilometer ke arah Selatan ke bukit-bukit di balik kota Pematang Siantar dan lebih dari 200 kilometer ke arah Tenggara ke dataran tinggi di sekitar Rantau Prapat di daerah Asahan.

Di bawah perlindungan pemerintah jajahan, perusahaan-perusahaan Barat diberi kebebasan hampir sepenuhnya dalam ekspansi, dan mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk mengubah suatu wilayah seluruhnya menjadi wilayah perkebunan yang tidak dapat tertundukkan oleh zaman *malaise* sekalipun.

Perkebunan di Sumatera Timur semakin pesat dengan ditetapkannya *Agrarische Wet* 1870 atau undang-undang Agaria pada 9 April 1870 oleh menteri jajahan De Waal. Penetapan undang-undang tersebut memberi dorongan kepada pemilik modal untuk menanamkan modalnya pada sektor perkebunan, terutama di pulau Jawa dan Sumatera. Khususnya untuk Sumatera Timur, perkembangan perkebunan, terutama didukung dengan adanya undang-undang konsesi yang berlaku untuk daerah swapraja di luar Jawa dan Madura.

Ketika perkebunan besar berkembang dengan pesat di Sumatera Timur, tidak pelak lagi perubahan sosial-ekonomi juga terjadi. Perkebunan yang besar ini sangat membutuhkan tenaga kerja, yang ternyata tidak mampu dipenuhi di daerah tersebut, maka jalan keluarnya adalah dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar.⁵

Sebagai akibat sistem rekrutmen tenaga kerja ini jumlah buruh yang berkerja di Sumatera Timur berkembang dari waktu ke waktu. Pada bulan Mei tahun 1884,

⁵ K. J. Pelzer, *Toen Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1985*, alih bahasa J. Rumbo (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hal. 27.

misalnya terdapat 27.000 orang buruh Cina dan 1.800 orang buruh Jawa yang bekerja di berbagai perkebunan di Sumatera Timur. Pada bulan Mei tahun 1900 jumlah buruh Cina meningkat menjadi 36.509 orang dan buruh Jawa bertambah menjadi 19.223 orang. Pada bulan Mei tahun 1927 jumlah buruh Cina tinggal 28.815 orang, sedangkan buruh Jawa bertambah menjadi 62.498, termasuk 19.929 buruh wanita.⁶

Para buruh tersebut dipekerjakan untuk menanam tanaman ekspor perdagangan, seperti hasil catatan Anderson, pada tahun 1822, ekspor lada Deli ke Penang mencapai 26.000 pikul. Di samping itu, tanaman seperti padi, tebu, jagung, dan kacang ditanam sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten).⁷

Kegiatan di perkebunan tiap-tiap tahun dibagi menjadi dua periode, yaitu periode kegiatan di lahan penanaman dan periode kegiatan di dalam gudang-gudang pemrosesan daun tembakau. Kegiatan di lahan penanaman tembakau dimulai dengan menyiapkan lahan, yaitu dengan melakukan penebangan pohon, pembersihan tanah, penggalian saluran air, serta mendirikan gudang-gudang pemrosesan daun tembakau dan barak-barak buruh. Kegiatan tersebut dikerjakan oleh para buruh pria. Di samping kegiatan persiapan lahan tersebut, dikerjakan juga persemaian bibit tembakau.⁸

Penyemaian bibit tembakau dilakukan oleh buruh lapangan, yang bertanggungjawab atas bidang penanaman yang telah diserahkan kepadanya, dan dibantu oleh beberapa orang buruh lainnya.

⁶ Sjafrie Sairin, "Kebijaksanaan Perburuhan di Perkebunan Sumatera Timur pada masa Kolonial". *Makalah Simposium Internasional Ilmu-ilmu Humaniora*, Yogyakarta, 1993.

⁷ J. Anderson, *op. cit.*, hal. 244-245.

⁸ K. J. Pelzer, *op. cit.*, hal. 68.

Perawatan bibit tersebut dilakukan oleh buruh wanita. Pekerjaan buruh lapangan dibantu oleh beberapa orang buruh pembantu, termasuk buruh wanita yang pada umumnya adalah gadis-gadis muda serta anak-anak buruh yang membantu pekerjaan orang tuanya. Mereka bertugas mencari ulat-ulat bulu pada daun tembakau di lahan penanaman.⁹

Ketika pemanenan tembakau tiba, buruh lapangan memetik dan selanjutnya mengirim daun tembakau berdasarkan jumlah tanaman ke bangsal atau gudang pengeringan yang telah disediakan. Setelah itu dilakukan proses fermentasi atau peragian, dan kemudian penyortiran atau pengklasifikasian berdasarkan kualitas daun tembakau. Proses terakhir adalah pengepakan daun tembakau yang dikemas dalam kotak tempat penyimpanan yang disebut bal.

Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam *koelie ordonantie*, jumlah jam kerja yang harus dijalani oleh buruh perkebunan adalah 10 jam setiap hari. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sering terjadi penyelewengan jumlah jam kerja, yang bahkan lebih dari 10 jam setiap hari.¹⁰

Beberapa orang buruh wanita yang telah menikah, dengan postur tubuh menarik, diambil oleh staf-staf Eropa dari kehidupan suami-isteri buruh. Adapun cara yang dilakukan dengan menuduh mereka melakukan suatu kesalahan yang harus dihukum. Bentuk hukuman yang dilakukan staf Eropa dengan cara memisahkan kehidupan keluarga.¹¹ Di samping itu di antara buruh wanita itu juga dijadikan seorang nyai atau pengurus rumah tangga staf Eropa.

⁹Jan Breman, *Taming the Coelie Beast, Plantation Society and the Colonial, Order in Southeast Asia* (New Delhi : Oxford University Press, 1989), hal. 94, 100.

¹⁰Jan Breman, *Ibid.*, hal. 103.

¹¹*Ibid.*, hal. 192.

Pembayaran upah kerja buruh yang rendah mengakibatkan para buruh harus bekerja keras untuk mencapai pendapatan maksimum, baik dalam hal intensitas kerja maupun lamanya jam kerja.

Pembayaran upah buruh pada awal perluasan perkebunan dalam bentuk dollar, yaitu dollar Mexico dengan 2,20 gulden per dollar, yang berlangsung sampai tahun 1890.¹² Sesudah tahun 1900 nilai tukar turun menjadi 1 dollar untuk 1,10 gulden.¹³ Penerimaan upah kerja buruh semakin menurun, karena harus dipotong dengan berbagai macam potongan.¹⁴

Upah terendah bagi kuli pria pada pembayaran pertama setelah kontrak di Sumatera Timur berkisar antara 30 sen per hari (1935-1937) dan 55 sen (1920-1921). Penelitian pemerintah jajahan pada tahun 1924 menunjukkan upah terendah kuli kontrak di Sumatera Timur adalah 24 sen, yang bekerja di pabrik 53,5 sen, sedangkan buruh yang tidak mempunyai keahlian, di kota 80 sen.¹⁵ Sulit untuk mendapatkan angka-angka perbandingan yang tepat, tetapi ketidak-senangan *planter-planter* terhadap ketergantungan keperluan buruh dari harga pasar tenaga kerja dengan sendirinya menjadi bukti bahwa terlalu rendahnya upah buruh-buruh di perkebunan Sumatera Timur pada waktu itu.

Namun demikian, buruh-buruh yang ada di perkebunan tersebut tetap saja menjalankan "tugas" kerjanya dengan baik. Hal ini disebabkan adanya *Poenale Sanctie*,

¹²*Ibid.*, hal. 109.

¹³H. Vankol, *Uit Onze Kolonien, Uitvoerig Reis Verhaal* (Leiden : A.W. Sijthoff, 1903), hal. 97-98.

¹⁴J. Vanden Brand, "De Millioenen Uit Deli", dalam Jan Breman, *Koelies, Planters en Koloniale Politiek* (Leiden: KITLV Uitgeverij, 1992), hal. 411.

¹⁵A.D.A. De Kat Angelino, *Colonial Policy* (Den Haag: Nijhoff, 1931). Jilid II, hal. 557.

suatu ketentuan bagian dari *koeli ordinansi* tahun 1880, yang mengikat buruh dengan kontraknya. Isinya adalah bahwa setiap buruh yang dikontrak, apabila meninggalkan pekerjaannya, lari dan mengabaikan kewajiban kerjanya dapat didenda atau dihukum penjara. Sidik jari mereka telah dibuat dengan jelas untuk mencari mereka seandainya kabur.

Salah satu gejala dari perlakuan yang demikian itu, seringkali terjadi penyerangan terhadap asisten-asisten kebun Eropa dan mandor-mandor Jawa, yang dilakukan oleh buruh-buruh perkebunan, karena sudah tidak dapat menahan diri lagi dari perlakuan yang semena-mena itu.

Golongan Belanda yang berpolitik *etisch*, yang lebih lunak dan ber-perikemanusiaan, telah menentang *Poenale Sanctie* itu semenjak permulaan abad ke-20, dan baru pada tahun 1918 Pemerintah Belanda secara teoritis berangsur-angsur menghapus peraturan itu. Akan tetapi, kepentingan sandaran politik kaum *planter* itu terlalu kuat, sehingga tidak ada satu pun perubahan sampai tahun 1929. Diterimanya usul *Amandemen Blaine* pada undang-undang tarif Amerika Serikat, yang mulai tahun 1932 melarang imfor tembakau yang dihasilkan oleh peraturan *Poenale Sanctie* itu. Krisis dunia yang melanda dunia semenjak tahun 1929 telah memberikan tantangan berat terhadap perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur.¹⁶

Dampak Terhadap Sosial Ekonomi Buruh

Usaha perkebunan selalu berkaitan dengan masalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang diperlukan bukanlah sembarang buruh, tetapi buruh yang dapat dibayar dengan gaji rendah, karena hanya dengan kondisi seperti

¹⁶J.H. Boeke, *The Structure of the Netherlands Indian Economy* (New York, 1942), hal. 142-151.

itu usaha perkebunan dapat sukses dalam artian ekonomi.

Untuk memenuhi kebutuhan buruh di atas, maka *Onderneming* mengambil kebijaksanaan untuk mendatangkan buruh dari luar Sumatera Timur. Kebanyakan dari buruh tersebut golongan Cina dan Jawa. Masuknya buruh import dari luar telah membawa masalah bagi buruh tersebut, antara lain masalah sosial ekonomi.

Perluasan dan perkembangan tanaman ekspor di Sumatera Timur pada waktu itu menimbulkan bermacam dampak, baik positif maupun negatif yang terjadi pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perkebunan. Dampak positif dalam bidang ekonomi dialami oleh orang-orang Eropa yang tergabung dalam manajemen perkebunan, yaitu berupa keuntungan yang besar.¹⁷

Dampak negatif yang dialami oleh buruh perkebunan tersebut, yaitu penerimaan upah kerja buruh yang rendah, terutama terjadi pada buruh wanita, sehingga mengurangi daya beli. Hal itu, mendorong mereka untuk bekerja keras, dengan bekerja keras tersebut banyak pula diserang oleh berbagai macam penyakit dan yang meninggal.

Sistem pembayaran upah di perkebunan tersebut ditentukan dengan upah standar yang telah disetujui oleh AVROS (*Algemene Vereeniging van Rubber Planters Vereeniging*). Untuk¹⁸ menghindari persaingan upah kerja antarperkebunan,

¹⁷J.L. Vleming Jr, *Tabak, Tabak-cultuuren, Tabak Sproducten van Nederlandch-Indie*. (Wetevreden: Landsdrukkerij, 1925), hal. 234-235.

¹⁸Ann Laura Stoler, *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt 1870-1979* (New Have/London: Yale University Press, 1985), hal. 42. Lihat juga J.S. Furnivall, *Nederlands India, A Study of Plural Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1944), hal. 354.

pembayaran upah buruh dibagi menjadi dua bagian dalam bentuk uang tunai dan sebagian lainnya berupa kupon kertas untuk ditukarkan dengan beras. Selanjutnya para buruh diwajibkan untuk menukar kupon tersebut dengan beras dan barang-barang kebutuhan lainnya dari kios atau kedai perkebunan. Sistem penyediaan bahan pangan beras tersebut dimaksudkan untuk mencegah kenaikan upah kerja. Beberapa perkebunan memberikan subsidi bahan pangan berupa padi sebanyak dua kali, yaitu satu kali per dua minggu atau dua kali per bulan kepada buruh untuk kebutuhan pangan sehari-hari.¹⁹

Adanya monopoli sumber bahan pangan mengakibatkan harga barang-barang di toko perkebunan lebih mahal daripada di luar perkebunan, karena pihak perkebunan dapat menentukan harga pada tingkat tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian, pihak perkebunan semakin memperkuat "genggamannya" terhadap para buruh.

Para buruh yang bekerja di perkebunan dibayar berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran upah kerja harian atau bulanan berkaitan dengan jumlah hari kerja yang sudah harus diselesaikan sebelumnya. Rata-rata jumlah upah buruh yang dibayar masih rendah, karena menurut pandangan pihak perkebunan, produktivitas para pekerja masih dianggap rendah pada masa awal periode perluasan penanaman.²⁰

Dampak lain di bidang sosial adalah munculnya masalah sosial yang serius, yang terjadi pada buruh perkebunan secara luas. Adapun yang dimaksud dengan

¹⁹Peter Boogard, (ed.), *Changing Economy in Indonesia*, Vol. 13, (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1992), hal. 113-114.

²⁰Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra 1863-1942* (Jakarta: Nasional Institute of Economic and Sosial Research, 1971), hal. 97.

masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku manusia yang melanggar adat-istiadat masyarakat.²¹

Protistusi yang berkembang di lingkungan perkebunan menyebabkan bentuk pernikahan yang terjadi di antara pasangan buruh tidak dapat bertahan lama. Sebuah kehidupan keluarga normal kehilangan sebuah bentuk kehidupan yang bersifat pribadi dengan adanya kondisi buruk bahwa pada buruh wanita dan pria, baik yang sudah menikah maupun belum, tinggal bersama-sama di dalam barak-barak perkebunan. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan sering terjadinya perpindahan kerja seorang buruh, baik wanita maupun pria, dari satu devisi ke devisi lain tanpa menganggap adanya pertalian keluarga yang normal.

Fasilitas tempat tinggal bagi buruh berupa barak-barak atau pondok buruh yang terbuat dari papan kayu. Sistem pembangunan barak-barak tersebut antara satu perkebunan dengan perkebunan yang lain berbeda-beda. Bangunan barak buruh biasanya terdiri dalam bentuk kelompok-kelompok dengan tiga atau empat buah barak dan dilengkapi dengan dapur, ditempati 120 sampai 160 orang buruh secara bersama-sama. Beberapa bangunan barak mempunyai sebuah toko perkebunan. Pada umumnya tipe sebuah barak buruh adalah suatu bangunan panjang dengan dua baris kamar-kamar berukuran kecil, yang memiliki pintu dan jendela dengan lantai tanah.²² Akan tetapi, beberapa perkebunan tidak menyediakan tempat tinggal khusus bagi buruh wanita yang belum menikah. Pihak perkebunan menempatkan buruh wanita di dalam barak-barak buruh pria, atau membebaskan mereka untuk memilih sendiri

²¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hal. 1.

²²H. George Heyting, *De Koeliewetgeving Voor de Buitengewesten van Nederlandsch-Indie* ('s-Gravenhage: W.P. Van Stockum & Zoon, 1925).

tempat tinggal di barak buruh Jawa atau Cina.²³ Hal itu, dilakukan oleh pihak perkebunan dengan alasan bahwa penyediaan tempat tinggal khusus bagi buruh wanita akan memerlukan biaya tambahan untuk membangun barak-barak daripada menem-patkannya menjadi satu di barak buruh pria. Faktor penerimaan upah kerja yang rendah dan tempat tinggal buruh dengan sistem barak, merupakan sebuah tekanan dan paksaan yang kuat bagi para buruh, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku mereka. Pola tingkah laku tersebut cenderung ke arah bentuk penyimpangan sosial, yaitu protistusi. Buruh wanita terpaksa melakukan protistusi di lingkungan perkebunan, karena dengan itu mereka memperoleh uang tambahan dengan cepat. Akan tetapi,²⁴ bagi buruh pria menjadi masalah baru, karena sebagian uang mereka habis untuk melacur.

Penutup

Manifestasi kapitalisme agraris yang diwujudkan dalam bentuk komersialisasi agraris adalah penyerapan faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan sebaliknya sangat menyengsarakan buruh.

Secara umum, dampak yang dialami oleh buruh perkebunan dengan multitekanan dari pihak perkebunan adalah kerja wajib yang sangat berat, karena banyaknya jam kerja yang dikonsumsi untuk melayani perkebunan. Bukan saja

²³Ann Laura Stoler, *op. cit.*, hal. 31.

²⁴Jan Breman, *op. cit.*, hal. 108.

alokasi waktu yang terbatas bagi buruh, tetapi hak-hak yang lainnya juga dikuasai oleh perkebunan. Para buruh sama sekali tidak berdaya, sehingga kehidupan mereka relatif stabil di bawah subsistensi. Keadaan seperti itu merupakan kenyataan umum bahwa buruh hidup dalam kemiskinan, kelaparan. Di samping itu, penyakit telah berjangkit dengan meraja rela.

Keberadaan buruh-buruh di daerah perkebunan tersebut disebabkan oleh adanya dua faktor, yang merupakan sebuah tekanan dan paksaan yang kuat. *Pertama* adalah faktor intern, yaitu keinginan dari sebuah unit keluarga yang miskin untuk memperoleh kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. *Faktor kedua*, adalah faktor ekstern, yaitu adanya pemaksaan dan kekerasan berupa penculikan. Praktek pen-culikan umumnya ditujukan kepada individu-individu yang dianggap memenuhi syarat sebagai syarat buruh perkebunan.

Dipandang dari aspek sosial ekonomi, kehidupan buruh berada di bawah garis subsistensi, karena pihak perkebunan kurang memperhatikan terhadap upah buruh. Aspek ekonomi yang rendah berpengaruh dalam kehidupan sosial buruh perkebunan. Pola tingkah laku tersebut berkembang dalam bentuk protistusi. Dengan demikian, kehidupan sosial buruh pada umumnya semakin terjatuh dalam masalah-masalah sosial dan semakin jauh menyimpang dari norma-norma yang umum berlaku di masyarakat.

Sudirman, S.S. adalah alumnus SMA Negeri I Manggeng, kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Sastra, Program Studi Sejarah Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak tahun 2000 bekerja sebagai staf Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Pemerintahan *Gampong* dan Peran *Keuchik* di Aceh Besar

Oleh: Seno

Pendahuluan

Pemahaman orang tentang konsep desa kelihatannya berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 1948 menjelaskan bahwa desa adalah bentuk daerah otonom yang terendah sesudah kota. Konsep desa tersebut kemudian berubah lagi setelah lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa, dalam pasal 1 a me-nyebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat dan terikat pada hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.¹

Sebelum undang-undang tersebut disahkan sebagai undang-undang, Menteri Dalam Negeri telah merumuskan bentuk-bentuk desa di Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 1969.² Pola desa yang baru ini didasarkan pada perubahan atau pemekaran berbagai desa sebagai pemukiman.

Menurut pasal 3 undang-undang tersebut, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan Lembaga Musyawarah Des. Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa

¹ Deppen-1984. Lihat juga Sofyan Ibrahim, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Desa*, (Banda Aceh: Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, 1993), hal.1.

² Deppen, 1982.

merupakan penanggung jawab utama dan bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya melalui camat dan memberi keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa.³

Jika kita perhatikan pengertian desa tersebut di atas, secara umum dapat kita katakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Kepala desa menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 1984, dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri berwenang melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat-istiadat, yaitu kebiasaan yang hidup serta dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila. Pembinaan dan pengembangan adat tersebut dimaksudkan agar adat-istiadat tersebut mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional dalam wawasan nusantara.⁴

Selanjutnya mengenai istilah desa di Indonesia, antara daerah satu dengan daerah lainnya tidaklah sama. Untuk nama desa hanya dipakai di Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan desa di Maluku disebut *negory/dati*; di Batak disebut *uta* atau *huta*. Di Sumatera Timur dengan sebutan *suku*, di Sumatera Selatan disebut *dusun*. Di Lampung disebut *tiuh* atau *dusun*. Di Ujung Pandang disebut *gaukang*, masyarakat Bugis menyebutnya *matawo*. Desa di Minahasa

³ Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1979.

⁴ Permendagri No. 11 Tahun 1984.

disebut *wanua*, di Sumatera Barat/Minangkabau disebut *nagari*.⁵ Untuk desa di Aceh disebut *gampong*. Di Aceh Besar, *gampong* juga dinamakan *meunasah*.⁶ Hal ini karena hampir di setiap *gampong* di Aceh besar ada *meunasahnya*.⁷

Pemerintahan *Gampong*

Jika kita perhatikan mengenai Sistem birokrasi pemerintahan terendah yang terdapat di Aceh Besar, maka kita akan menjumpai adanya sistem Pemerintahan *Gampong*. Sistem pemerintahan *gampong* ini sehari-harinya dapat secara langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Di Aceh Besar, antara *gampong* dan *kemukiman* tampaknya saling hubungan satu dengan yang lainnya. Tidak ada *gampong* tanpa *kemukiman*. Demikian juga sebaliknya, tidak ada *kemukiman* tanpa adanya *gampong*.

Di Aceh Besar, pemerintahan *gampong* dijalankan bersama-sama perangkat *gampong* yang dipimpin oleh kepala *gampong* yang dalam sistem birokrasi disebut *keuchik*. *Keuchik* ini sehari-harinya bertugas sebagai kepala pemerintahan. Di samping itu *keuchik* juga berperan melaksanakan urusan adat-istiadat di *gampongnya*. Selain ada *keuchik*,⁸ di *gampong-gampong* di Aceh Besar juga terdapat *imeum meunasah*, yang bertugas

⁵Husin Sayuti, "Pembangunan Pedesaan" dalam *Buku Materi Pokok Studi Masyarakat Indonesia* (Jakarta: UT 1999), hal. 4.2

⁶ A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983), hal.80.

⁷ *Meunasah* adalah tempat ibadah umat Islam di Aceh yang ukurannya lebih kecil dari mesjid. Biasanya *meunasah* ini dipakai untuk belajar agama bagi anak-anak di *gampong*, yang dipimpin oleh seorang *teungku meunasah*.

⁸Adi Warsidi, *Pemerintahan Gampong dan Masalah - Masalahnya, Studi Kasus di Kec. Peusangan Matang Glumpang Dua Kab. Aceh Utara*, (Banda Aceh: PPIS, 1977), hal. 3.

dalam urusan kerohanian dan keislaman.⁹ Hubungan antara *keuchik* dan *imeum meunasah* sangat erat dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada pepatah Aceh yang mengatakan, *hukom ngon adat lage zat ngon sifeut, hukom ngon adat hana tom cre*,¹⁰ yang artinya hukum (Islam) dengan adat seperti zat dengan sifatnya, hukum dengan adat tidak pernah bercerai. Mengingat eratnya hubungan antara *keuchik* dengan *imeum meunasah*, maka sering kali seorang *keuchik* merangkap sebagai *imeum meunasah*.

Di samping itu, di *gampong-gampong* di Aceh Besar juga terdapat lembaga adat yang disebut *tuha peuet*,¹¹ yang artinya orang-orang yang dituakan. Jumlah *tuha peuet* ini tidak selalu sama. Kadang-kadang ada lima orang, kadang ada tujuh orang atau delapan orang, tergantung luas sempit dan padat tidaknya penduduk *gampong* tersebut. Semakin luas dan padat penduduk *gampong*, akan semakin banyak jumlah *tuha peuet* yang ada di *gampong* tersebut. Keberadaan *tuha peuet* ini berfungsi sebagai tempat menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di masyarakat, menyelesaikan sengketa di antara warga masyarakat dan menimbang keadilan serta memberi bahan-bahan pemikiran dan nasehat bagi masyarakat *gampong*. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, *Keuchik* dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris *gampong*.

⁹Adi Warsidi, *Pemerintahan Gampong dan Masalah - Masalahnya, Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Matang Glumpang Dua Kabupaten Aceh Utara*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1977), hal. 3.

¹⁰ Rusdi Sufi, *Karakteristik Islam di Aceh pada Abad XX*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1996), hal. 18.

¹¹ Ardi Warsidi, *loc.cit.*

Seperti telah disebutkan di atas, di samping ada *gampong*, juga terdapat *kemukiman*. *Kemukiman* ini merupakan kesatuan wilayah tertentu yang terdiri dari beberapa *gampong* yang dikoordinir oleh seorang kepala *mukim*.¹² Di Aceh Besar ini, *kemukiman* sebagai salah satu bagian struktur pemerintahan, tidak diatur dengan tegas dan jelas, baik kelembagaannya maupun fungsionarisnya.

Peranan *Keuchik*

Kegiatan pemerintahan *gampong* di Kabupaten Aceh Besar, tampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga secara perlahan-lahan terjadi pergeseran nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat *gampong*. *Keuchik* sebagai kepala *gampong* mempunyai tugas-tugas kemasyarakatan yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas kemasyarakatan tersebut di antaranya yaitu memimpin musyawarah di *meunasah-meunasah*, memimpin kerja bakti (gotong royong), menyelesaikan konflik yang terjadi di antara sesama warga masyarakat, kadang juga melamaran jodoh, memimpin kenduri perkawinan, mengurus kematian warganya, mendamaikan sengketa keluarga, menerima tamu *gampong* dan lain-lain.

Dalam urusan perkawinan misalnya, *keuchik* dan *imeum meunasah* mempunyai peranan yang sangat menentukan. Menurut adat Aceh, pihak pria yang aktif meminang gadis. Pinangan biasanya dilakukan melalui seorang *seulangke* (perantara). Jika pinangan diterima kemudian dilakukan pemberian tanda pengikat pertunangan yang dinamakan *kong norit/ha*¹³ yang biasanya berupa emas murni dengan jumlah sesuai

¹² A. Hasjmy, *loc.cit.*

¹³ A. Mustadjib, *Pelaksanaan UU Perkawinan dan Masalah-masalahnya Pada Masyarakat Islam Banda Aceh dan Sekitarnya*, (Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1977), hal. 2.

dengan kesepakatan. Penyerahan tanda *kong norit/ha* ini dilakukan oleh *keuchik gampong* calon mempelai laki-laki dan diterima oleh *keuchik gampong* calon pengantin perempuan.

Akad nikah biasanya dilakukan di mesjid *kemukiman gampong* bersangkutan atau di *meunasah gampong dara baro* dan dilakukan oleh *imeum meunasah*, tetapi banyak juga yang dilakukan di Kantor Urusan Agama atau di rumah *dara baro* yang disaksikan oleh *keuchik* setempat. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pesta perkawinan dilakukan oleh *keuchik, imeum meunasah, tuha peuet*, dibantu pemuda-pemuda *gampong*. Mengingat tugas *keuchik* dan *imeum meunasah* dalam pelaksanaan perkawinan itu sangat banyak, maka keduanya memperoleh imbalan ala kadarnya dari orang tua mempelai.¹⁴

Di lingkungan warga masyarakat *gampong*, sering kali terjadi konflik, baik konflik perdata maupun pidana. Dalam hal menyelesaikan konflik perdata, kebanyakan dapat diselesaikan di *gampong* bersama *keuchik, imeum meunasah* dan *tuha peuet*, karena baik menurut adat kebiasaan maupun menurut aturan tertulis yang berlaku lebih mengutamakan penyelesaian secara damai. Jika masalahnya tidak dapat diselesaikan oleh *keuchik* di *gampongnya*, maka masalah perdata tersebut, didamaikan di pengadilan.

Sebaliknya mengenai konflik pidana, yang mana menurut aturan pidana (hukum secara pidana) bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku, yaitu melalui penyelidikan, penuntutan dan kemudian diadili oleh pengadilan. Menurut aturan tindak pidana tidak ada suatu tindakan yang dapat dilakukan untuk menghalangi jalannya proses pidana. Namun demikian, berkat kebijaksanaan dan wibawa *keuchik*, segala tindak pidana ringan yang terjadi di *gampongnya*, sebagian besar dapat diselesaikan secara damai. Apalagi jika

¹⁴ *Ibid.*

menurut adat, baik konflik perdata maupun konflik pidana dapat diselesaikan secara damai/musyawarah dengan melibatkan *keuchik, imeum meunasah* dan *tuha peuet*.

Berkat peran *keuchik*, yang dibantu oleh *imeum meunasah* dan *tuha peuet* yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah di *gampongnya*, maka meskipun ketentuan tentang proses penyelesaian dari suatu tindak pidana mengatur sedemikian rupa, namun untuk tindak pidana ringan/kecil, pemerintah masih memberi kesempatan untuk diselesaikan secara damai di *gampong*. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah mengharapkan perkara-perkara sederhana/pelanggaran kecil dapat diselesaikan oleh *Keuchik* di *gampong* setempat.¹⁵ Sebagaimana lazimnya dalam masyarakat adat, hukumnya tidak tertulis sehingga tidak dapat dilihat secara kongkrit unsur-unsur dari suatu yang dianggap pelanggaran.¹⁶ Dalam hal ini, orang yang lebih tahu dan lebih berperan adalah *keuchik*, sehingga *keuchiklah* yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menyelesaikannya.

Agar pemerintah *gampong/keuchik* mampu menyelesaikan perkara-perkara kecil/ ringan yang terjadi di *gampongnya*, maka Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 1990, yang antara lain dimaksudkan untuk memfungsikan kembali lembaga adat yang ada di *gampong*, agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan di *gampong* itu sendiri.¹⁷

Erat kaitannya dengan hal tersebut di atas, Soepomo mengatakan bahwa hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran atau perbuatan kejahatan yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk dapat dikenai

¹⁵ T. Azwar, *Jemala* No.14 Th 1993, hal. 17.

¹⁶ Busar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hal. 62.

¹⁷ Sofyan Ibrahim, *op. cit.*, hal. 40.

hukuman atau tindakan balasan atau perbuatan pengembalian keseimbangan seperti dalam pasal 1 KUHP. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum pada saat petugas hukum yang bersangkutan mempertahankan terhadap orang yang melanggar peraturan itu.¹⁸ Jadi delik adat lahir, berkembang dan lenyap sesuai dengan jalannya perubahan perasaan keadilan rakyat. Perasaan keadilan rakyat bergerak berhubungan dengan pertumbuhan hidup masyarakat yang selalu dipengaruhi oleh faktor lahiriah dan batiniah.

Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran pidana, maka orang pertama yang paling berperan dalam menyelesaikan masalah dan tindak pidana di *gampong* adalah *keuchik*. Jadi berhasil tidaknya penyelesaian secara damai dari pelanggaran pidana yang terjadi sangat tergantung pada kebijaksanaan dan wibawa *keuchik* dalam melakukan pendekatan kepada para pihak yang terlibat. Jika ternyata *keuchik* tidak sanggup menyelesaikan pelanggaran pidana tersebut, maka *keuchik* akan menyerahkan pelanggaran pidana tersebut kepada pihak yang berwajib / Polisi Sektor agar dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹⁹

Keuchik sebagai penanggung jawab utama dalam menjalankan pemerintahan *gampong*, berkewajiban menjaga kerukunan dan kedamaian antara warga *gampong*. Kemauan dan kewibawaan *keuchik* dalam melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana, merupakan modal utama berhasil tidaknya dalam usahanya menyelesaikan secara damai dari tindak pidana tersebut.

Keuchik sebagai "wakil pemerintah" berkewajiban menjalankan

¹⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1958), hal. 92.

¹⁹ Sofyan Ibrahim, *op.cit.* hal. 47.

tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di *gampongnya*, tampaknya merupakan tugas yang tidak ringan. Dengan demikian, peranan *keuchik* di suatu *gampong* sangat luas dan penting. Dikatakan luas karena dapat mencakup hampir semua bidang kehidupan dan penting karena ikut menentukan maju mundurnya masyarakat. Tidak dapat dibayangkan di sini, bagaimana jalannya kegiatan masyarakat *gampong* tanpa adanya lembaga *keuchik* ini.

Dengan tugas dan pekerjaannya yang berat ini, kadang-kadang seorang Kepala *gampong* (*keuchik*) dihadapkan pada dilema yang serba sulit. Sebagai contoh misalnya, dulu pernah terjadi di salah satu *gampong* di Aceh Besar, ketika diadakan Pemilihan Umum. Sebagai lembaga pemerintah, seorang *keuchik* dituntut untuk memenangkan Golongan Karya. Namun kenyataan di masyarakat, rakyatnya lebih suka memilih PPP, sehingga berkat dukungan masyarakat, PPP memenangkan pemilu. Kekalahan Golkar ini menyebabkan *keuchik* yang bersangkutan tidak mendapat simpati dari atasannya (camat).²⁰

Partisipasi Masyarakat

Sebelum mengambil keputusan dan kebijaksanaan, pemerintah *gampong* terlebih dahulu mengadakan musyawarah yang melibatkan warga masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah tersebut sangat menentukan segala kebijaksanaan dan keputusan pemerintah *gampong*. Musyawarah itu sangat perlu agar nantinya tidak terjadi konflik dengan rakyatnya. Dengan adanya musyawarah antara aparat *gampong* dengan warga masyarakat, maka pelaksanaan keputusan dan kebijaksanaan akan sejalan dengan keinginan masyarakat. Mengingat pentingnya musyawarah dalam pemerintahan *gampong*, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada kekuasaan yang

dianggap sah sebelum melalui keputusan musyawarah.

Selanjutnya mengenai fungsi *meunasah*, selain untuk beribadah dan belajar agama bagi anak-anak, juga dipakai untuk kegiatan kemasyarakatan. Dalam bidang kegiatan kemasyarakatan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, sebagai tempat kegiatan para pemimpin masyarakat *gampong*. kedua, sebagai kegiatan warga dalam bermusyawarah dengan pemimpin *gampong*, di samping juga untuk mengawasi jalannya pemerintahan *gampong*. Dan yang ketiga, sebagai badan peradilan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di *gampong*.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem birokrasi pemerintahan terendah di Aceh Besar adalah pemerintahan *gampong*, yang dipimpin oleh seorang kepala *gampong* yang di Aceh Besar disebut *keuchik*. Di *gampong* juga terdapat *meunasah* sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah sehari-hari, belajar agama bagi anak-anak dan tempat musyawarah. *Meunasah* ini dipimpin oleh seorang *imeum meunasah* yang kadang-kadang jabatan tersebut dirangkap oleh *keuchik*. Hal ini membuktikan betapa eratnya hubungan antara *keuchik* dengan *imeum meunasah*.

Peran *keuchik* di *gampong* cukup banyak, di antaranya yaitu menyelenggarakan pemerintahan *gampong*. *Keuchik* sebagai kepala *gampong* mempunyai tugas kemasyarakatan yang meliputi memimpin musyawarah di *meunasah*, memimpin gotongroyong, menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, melamarkan jodoh, memimpin kenduri, mengurus kematian, menerima tamu untuk *gampong* dan sebagainya.

Dalam urusan perkawinan, peranan *keuchik* sangat besar, karena untuk urusan perkawinan *keuchik* harus ikut serta,

Di samping ia harus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan upacara-upacara dan pesta perkawinan.

Keuchik juga bertanggung jawab untuk ikut menyelesaikan sengketa di antara warga, baik itu sengketa perdata maupun pidana agar dapat diselesaikan secara musyawarah/damai. Jika ada sengketa pidana yang terlalu besar dan tidak dapat diselesaikan oleh *keuchik*, *imeum meunasah*

dan *tuha peuet*, maka *keuchik* harus membawa masalah tersebut kepada pihak yang berwajib.

Dalam memimpin musyawarah untuk mencapai kata sepakat *keuchik* selalu melibatkan partisipasi masyarakat, agar dalam mengambil keputusan tidak menimbulkan perselisihan dengan warga masyarakat di *gampongnya*.

Drs. Seno adalah alumnus SMA Negeri Boyolali, kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Sastra, Program Studi Sejarah Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus sarjana muda pada tahun 1981 serta sarjana pada tahun 1985. Sejak tahun 1996 bekerja sebagai staf Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.



²⁰ Serambi Indonesia, tanggal 19 September 1996, hal. 1 dan 11.

Okupasi Kerja Sektor Nelayan: Suatu Dampak Kegiatan Kepariwisata Pada Masyarakat Pedesaan Iboih Sabang-Aceh

Oleh Cut Nadia Fitrina

I

Kajian pariwisata telah lama menjadi perhatian para ahli ilmu antropologi. Di antara antropolog yang pernah mengkaji pariwisata adalah Valene L. Smith, Davydd J. Greenwood, Eric Cristal, Wayan Geriya dan S.Budhisantoso. Hasil kajian mereka antara lain menunjukkan bahwa pariwisata telah membawa pengaruh terhadap masyarakat yang dikunjungi. Pengaruh tersebut pada umumnya terlihat dari semakin berkembangnya ekonomi masyarakat, dan juga pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat akibat terjadinya kontak antara dua kebudayaan yang berbeda, yaitu budaya masyarakat yang datang dan budaya masyarakat yang dikunjungi. Perbedaan dua budaya ini akan mengakibatkan salah satu budaya akan mengalami perubahan. Biasanya yang lebih sering mengalami perubahan adalah budaya masyarakat yang didatangi.

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setempat dimungkinkan oleh sejumlah arena sosial yang memungkinkan orang-orang berinteraksi. Arena sosial dalam hubungan ini dikaitkan dengan kegiatan kepariwisataan yang menyebabkan kontak langsung antara wisatawan dan masyarakat. Arena tersebut terdapat dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam pariwisata.¹ Dalam kegiatan kepariwisataan ini tercakup dalam empat jenis kebutuhan dasar dari para wisatawan

yang perlu dikembangkan yaitu: akomodasi, transportasi, jasa, dan atraksi. Keempat kebutuhan dasar inilah terjadi interaksi dan sekaligus membentuk arena sosial antara wisatawan dan masyarakat.²

Berdasarkan pemikiran di atas, salah satu aspek pariwisata yang paling utama adalah aspek ekonomi, yang membawa perkembangan terhadap masyarakat yang didatangi sebab sesuatu hal yang pasti para wisatawan akan datang ke daerah tersebut dan akan membelanjakan uangnya di daerah yang dikunjungi demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedatangan para wisatawan ini tentu akan membawa peluang usaha baru bagi masyarakat yang didatangi.

Keadaan ini juga terlihat bagi penduduk desa Iboih yang merupakan daerah tujuan wisata yang paling utama di pulau Weh. Desa Iboih ini memiliki beberapa obyek wisata yang sangat indah seperti taman laut pulau Rubiah, gua-gua alam, hutan taman wisata, air terjun dan tugu kilometer nol. Dengan adanya objek-objek wisata ini telah membawa perkembangan yang cukup berarti terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa Iboih. Hal ini disebabkan para wisatawan berdatangan untuk menikmati keindahan alam objek wisata yang terdapat di desa Iboih.

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan ini telah menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat di beberapa sektor, salah satunya adalah sektor transportasi laut.

Sektor ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Dengan perkembangan transportasi laut ini, telah terjadi okupasi kerja di sektor tersebut. Okupasi tersebut terjadi bagi penduduk yang dulunya bekerja sebagai nelayan. Mereka mulai mengalihkan usahanya dari menangkap ikan ke penyewaan perahu untuk mengangkat para turis ke obyek wisata pulau Rubiah. Pen-dapatan mereka dari menyewakan perahu ini jauh lebih tinggi dibanding pendapatan mereka menjadi nelayan penangkap ikan dimana pada saat mereka sebagai nelayan penangkap ikan pendapatan mereka hanya berkisar Rp. 10.000 setiap harinya. Setelah berkembangnya sektor pariwisata pendapatan mereka bertambah disebabkan selain untuk menangkap ikan perahu mereka juga disewakan untuk mengangkut turis mengunjungi berbagai objek wisata yang ada.

II

Pengaruh pariwisata akan semakin terasa bila masyarakat mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Ini semua tidak terlepas dari segala kelakuan dan tindakan yang dapat mereka interpretasikan. Hal ini sudah tentu tidak terlepas dari pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pengetahuan ini diasumsikan dalam kebudayaan dimana disebutkan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang dihadapi untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan.³

Dengan demikian kebudayaan merupakan serangkaian aturan, petunjuk, rencana dan strategi yang terdiri atas serangkaian model kognitif yang digunakan secara selektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan dan

keadaan yang dihadapi.⁴ Ini semua menjadi sumber bagi sistem penilaian sesuatu tindakan yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada untuk dapat lebih meningkatkan kehidupannya.

Salah satu dari kegiatan kepariwisataan dapat mengakibatkan terjadinya okupasi atau perubahan pola kerja terhadap masyarakat yang dikunjungi. Sebab dengan adanya pariwisata akan membawa peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Peluang usaha baru ini kadang-kadang merupakan perkembangan dari peluang-peluang kerja yang telah ada. Seperti yang dikemukakan oleh Danandjaja pada masyarakat Trunyan Bali. Dengan maraknya arus wisatawan yang berkunjung ke desa Trunyan, telah mengubah lapangan usaha masyarakat. Dimana pada mulanya mereka mempergunakan perahu lesung hanya untuk menangkap ikan di danau Batur, tetapi setelah adanya kepariwisataan telah mengubah fungsi perahu lesung menjadi alat transportasi yang disewakan kepada turis. Dan dalam tahap selanjutnya kepemilikan perahu lesung telah diganti dengan perahu bermotor.⁵

Obyek wisata utama yang ada di desa Iboih yaitu pulau Rubiah berada di tengah laut. Untuk mencapai objek wisata ini harus mempergunakan transportasi laut seperti "speed bot", perahu bermotor atau perahu biasa. Demikian juga dengan objek wisata berupa gua alam. Untuk mencapai gua-gua alam ini harus mempergunakan sarana transportasi laut.

Pulau Rubiah sebagai objek wisata utama, dengan letaknya yang berada di tengah-tengah laut sekitar ± 1 mil dari pantai Iboih serta pulau-pulau lain sekitarnya telah membawa rezeki baru bagi nelayan di desa

¹ Hari dan I. Made Purna, *Dampak Pariwisata Terhadap Masyarakat Sekitarnya*, (Jakarta: Dirjenbud, Direktorat Sejarah & Nilai Tradisional, IPNB, 1991), hal.85.

² Wayan Geriya, *Pariwisata dan Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat di Bali*, (Denpasar: Fak. Sastra, Universitas Udayana, 1983), hal.2.

³ Parsudi Suparlan, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya, Perspektif Antropologi Budaya*, (MSSI, UI, November/Februari, Jilid 9, No.2-3), hal.237-248.

⁴ Spradley, 1972, hal.139.

⁵ James Danandjaja, *Kebudayaan Petani Desa Trunyan di Bali*, (Jakarta: UI-Press, 1989), hal.238.

Iboih. Keadaan ini telah membuat terjadinya okupasi pekerjaan bagi nelayan dari menangkap ikan ke penyewaan perahu bagi para wisatawan. Jumlah mereka adalah 10 orang.

Menurut para nelayan pekerjaan seperti ini sangat menguntungkan mereka. Mereka tidak perlu bersusah payah lagi menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Setiap harinya mereka cukup menunggu turis yang hendak menyewa perahunya. dan pendapatan dengan mengangkut turis ini jauh lebih lumayan.

Pada waktu menjadi nelayan penangkap ikan, hasil yang mereka dapat hanya sekitar Rp.5.000-10.000 setiap harinya. Jumlah tersebut baru didapat dengan bekerja keras sebagai nelayan dengan berangkat ketika hari masih senja dan pulang pada waktu fajar sudah menyingsing. Belum lagi ketika hari terang bulan. Pada saat ini ikan sangat sulit untuk didapat. hasil yang didapatpun tentunya akan lebih kecil.

Dengan adanya pariwisata keadaan ini jauh berubah. pendapatan para nelayan semakin besar. Apalagi saat ini sebahagian besar nelayan ini telah mempunyai perahu bermotor atau bot. Dengan mengantar para turis ke pulau Rubiah pulang pergi, mereka dibayar sebesar Rp.10.000 per turis. Tarif yang mereka tetapkan tentu lebih besar apabila turis-turis ini ingin mengunjungi pulau-pulau lain selain pulau Rubiah.

Selain itu para nelayan ini juga sering menyewakan perahunya secara harian. Besar sewa perahu secara harian ini adalah sebesar sebesar Rp.100.000. Dengan menyewa perahu secara harian ini para turis bisa mengunjungi seluruh objek wisata yang ada di desa Iboih selama satu hari penuh. Mereka akan dibawa oleh para nelayan ini mengunjungi pulau Rubiah, menyusuri gua alam atau memancing ikan di daerah bebas memancing. Di samping sebagai pemilik perahu, para nelayan ini juga sekaligus sebagai pemandu wisata bagi para wisatawan. Selain itu, tanpa pernah kursus, rata-rata para nelayan telah mampu berbahasa Inggris

sedikit atau banyak. Mereka belajar dari lingkungannya sendiri. Hal ini memudahkan mereka berkomunikasi dengan turis-turis asing. Selanjutnya menurut para nelayan ini, membawa turis asing lebih menguntungkan dibanding dengan membawa turis lokal. Sebab turis asing rata-rata lebih royal dibandingkan dengan turis lokal sehingga para nelayan dapat menaikkan harga sewa dibanding dengan harga biasa. Tapi bukan berarti para nelayan ini tidak mau membawa para penyewa dari turis lokal.

Selain menyewakan perahu, para nelayan juga menyewakan peralatan memancing. Peralatan pancing yang mereka sewakan terdiri dari benang pancing, joran dan kail. Sedangkan umpan pancing dibeli sendiri oleh para penyewa. Satu set alat pancing biasanya mereka sewakan seharga Rp.5.000 sehari.

Pendapatan nelayan dari menyewakan perahu semakin tinggi pada saat hari libur. Karena banyak turis (terutama turis lokal) menghabiskan hari liburnya di desa Iboih.

Selain dalam bidang penyewaan perahu, pendapatan para nelayan dari penjualan ikan hasil tangkapan juga semakin tinggi. Memamng tidak selamanya para nelayan ini menyewakan perahunya kepada para turis. Kadang-kadang mereka juga melaut untuk menangkap ikan apabila perahu mereka tidak ada yang menyewa.

Dengan berkembangnya kepariwisataan di desa Iboih, pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan lebih mudah. Harga ikanpun semakin tinggi, seperti misalnya sebelum ada turis 1 kg ikan harganya Rp. 10.000, sekarang 1 kg ikan mampu dijual dengan harga Rp.30.000. Tinginya harga ikan tangkapan para nelayan ini juga didukung karena semakin sedikitnya para nelayan ini yang melaut setiap harinya sehingga ikan hasil tangkapan semakin sedikit. Hal ini uga disebabkan pemasarannya sudah jelas yaitu restoran-restoran yang banyak didirikan di desa Iboih setelah masuknya kepariwisataan.

Dari pemaparan di atas telah jelas terlihat bahwa adanya pariwisata telah memberikan peranan yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi para nelayan di desa Iboih. Dimana pada saat belum adanya pariwisata, mereka hanya mengandalkan perekonomian dari hasil menangkap ikan. Hasil dari menangkap ikan ini hanya pas-pasan atau bahkan kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada waktu itu pendapatan harian mereka hanya berkisar antara Rp.5.000-Rp.10.000 saja.

Keadaan ini membaik dengan berkembangnya sektor pariwisata di desa Iboih. Pendapatan mereka bertambah, sebab perahu yang mereka miliki selain mereka penggunaan untuk menangkap ikan, kini telah beralih ke jasa penyewaan perahu untuk mengangkut turis mengunjungi berbagai objek wisata yang ada di desa Iboih. Besarnya pendapatan mereka dari menyewakan perahu ini berkisar antara Rp.30.000 sampai Rp.50.000 setiap harinya. dengan keadaan yang demikian tidaklah heran apabila pada saat ini nelayan di desa Iboih semuanya sudah memiliki perahu bermotor.

III

Kegiatan kepariwisataan di daerah pedesaan Iboih telah membawa pengaruh terhadap perkembangan ekonomi penduduk setempat. Kepariwisata telah menumbuh-kembangkan sektor-sektor usaha

yang digeluti oleh penduduk. Selain itu kepariwisataan juga menumbuhkan peluang usaha baru bagi masyarakat.

Salah satu perkembangan ekonomi penduduk yang diakibatkan oleh kepariwisataan dapat dilihat pada sektor transportasi. Semenjak maraknya kepariwisataan di desa Iboih, telah mengembangkan sektor transportasi. Salah satunya adalah sektor transportasi laut. Pada sektor transportasi laut ini, telah terjadi okupasi kerja bagi penduduk yang selama ini hanya mempergunakan perahunya untuk menangkap ikan, telah berganti haluan dengan cara menyewakan perahu tersebut untuk membawa turis keberbagai objek wisata yang ada di tengah laut, terutama ke pulau Rubiah. Terjadinya okupasi kerja ini sangat menguntungkan penduduk. Pada masa sebelum adanya kepariwisataan, perahu ini hanya mereka pergunakan untuk menangkap ikan. Pendapatan mereka dari menangkap ikan ini pada saat itu sangat sedikit. karena pemasaran ikan hasil tangkapan sangat sulit.

Setelah maraknya kepariwisataan dan terjadi okupasi kerja bagi penduduk yang bekerja sebagai nelayan ini, keadaan tersebut telah jauh berubah. Pada saat ini banyak turis yang membutuhkan jasa angkutan laut ini. Dengan demikian kegiatan kepariwisataan telah membawa perkembangan bagi kehidupan nelayan di desa Iboih.

Cut Nadia Fitina, S.Sos adalah alumnus SMA Negeri I Sabang pada tahun 1992, kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Isipol, Jurusan Antropologi, Universitas Sumatera Utara, Medan. Saat ini magang pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Industri Kecil: Usaha Menumbuhkan Kewiraswastaan Masyarakat di Pedesaan (Pengrajin Sulaman Kasab di Samatiga, Aceh Barat)

Oleh: Sri Wahyuni

Pendahuluan

Usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berjalan semenjak manusia itu ada. Adapun yang menjadi pendorong usaha itu adalah dorongan-dorongan alamiah, baik untuk mempertahankan diri maupun dorongan untuk mengembangkan kelompok. Semua itu akan terlihat dalam bentuk hasrat, kehendak, dan kemauan, baik dari manusia itu sendiri maupun dalam kelompok sosial. Oleh karena itu, usaha untuk memenuhi kebutuhan bertitik tolak dari faktor yang sangat esensial dari manusia ataupun kelompok.

Faktor lain yang sangat berperan dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut adalah alam lingkungan dimana manusia tersebut berada, karena lingkungan memberikan alternatif yang dapat dipakai untuk mencapai kebutuhan. Dalam usaha untuk mewujudkan kebutuhan itu berperan pula pengetahuan kebudayaan yang dipenuhi oleh setiap individu di dalam suatu masyarakat. Pengetahuan kebudayaan yang merupakan kompleks ide, nilai serta gagasan utama menjadi sumber dan tolok ukur bagi setiap individu dalam bertindak laku, termasuk tingkah laku dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian juga halnya masyarakat di Kecamatan Samatiga, yang mana di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya. Kaum perempuan di Kecamatan Samatiga Aceh Barat ini mengusahakan kerajinan "tradisional" berupa sulaman benang emas yang lebih dikenal dengan *kasab*.

Sulaman *kasab* merupakan suatu sumber lapangan kerja yang cukup potensial, karena keberadaannya sebagai warisan budaya yang tergolong ke dalam kerajinan tradisional. Kerajinan tradisional adalah suatu proses pembuatan berbagai macam barang dengan mengandalkan tangan serta menggunakan alat-alat yang sederhana dalam lingkungan rumah tangga.

Keterampilan yang diperlukan diturunkan dari generasi ke generasi secara informal dan bukan melalui pendidikan formal. Pekerjaan sebagai pengrajin *kasab* tampaknya sangat efektif untuk menampung anak-anak yang putus sekolah terutama anak perempuan, membantu ekonomi keluarga dan juga sekaligus untuk melestarikan warisan budaya. Tidak dapat dimungkiri bahwa tumbuhnya jalur pemasaran di dalam memasuki era globalisasi ini merupakan salah satu pendorong berkembangnya suatu kerajinan tradisional.

Motif Hias Kasab dan Perkembangannya

Sulaman *kasab* (sulaman benang emas) adalah suatu ragam hias atau motif hias yang sudah lama dikenal di Aceh Barat bahkan di daerah Istimewa Aceh, khususnya bagi suku bangsa Aceh. Ragam hias ini merupakan keterampilan bagi kaum perempuan yang diwarisi dari generasi sebelumnya.

Motif dasar sulaman *kasab* berasal dari unsur-unsur alam sekitar, khususnya flora. Masing-masing motif tersebut mempunyai makna simbolik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh,

khususnya masyarakat di Kecamatan Samatiga Aceh Barat.

Di antara motif-motif yang sangat menonjol adalah; *sulu bayong* (ukiran berlekuk), perlambang keindahan, kemegahan, kebesaran jiwa dan budi pekerti serta menunjukkan kepahlawanan. *Bungong Meulu* (bunga melur) bermakna harum, putih, bersih melambangkan kesucian dan kebersihan jiwa di dalam perjuangan hidup. *Bungong Keumang* (bunga mekar), bermakna membawa tuah dan melambangkan bahwa dalam hidup manusia harus mempunyai pedoman baik itu agama, adat dan kemasyarakatan. *Pucôk* (pucuk) bermakna kesuburan dan sejak kecil sudah membalas guna atau melambangkan juga sebagai generasi yang perlu mendapat perhatian agama dan pendidikan. Selanjutnya ada pula motif *awan si on* (awan segumpal), yang melambangkan persatuan dan kesatuan dengan keteguhan pendirian dan semangat. Motif *awan meu ikôt* (awan berarak) melambangkan bahwa dalam sebuah sistem kemasyarakatan dibutuhkan kebersamaan, dan gotong royong dengan penuh keakraban. Motif *taloe ie* (garis lurus) melambangkan vitalitas hidup, lancar dan tidak menyimpang, mempunyai kedamaian dan ketenangan. Motif *geulugô* (garis lengkung), bermakna lembut menarik, merupakan kualitas hidup yang berirama, memberi sifat aktif, ide yang lemah lembut dan memberi kesinambungan. Adapun motif *lingkông* (lingkaran) mensimbolkan dalam mengadakan musyawarah atau mufakat dengan cara bergiliran bergerak memberikan kesepakatan. Sedangkan motif *cicém* (burung) bermakna ulet dan menyenangkan empunya.¹

¹Nasriaty RS, *Motif Hias Tradisional Aceh Barat Suatu Penelitian yang dilakukan di Dua Desa : Gampong Teungoh dan Gampong Cot, Kecamatan Samatiga*, (Banda Aceh: PPISB Unsyiah Banda Aceh, 1992), hal.21.

Dalam Kehidupan masyarakat Samatiga Aceh Barat, pemakaian motif hias sulaman *kasab* merupakan faktor yang menentukan dalam rangka upacara-upacara adat. Sehingga dengan berbagai ragam motif hias diterapkan pada benda-benda perlengkapan adat dengan tujuan untuk memperindah ruangan dan alat perlengkapannya. Selain itu, motif hias juga meluas kepada benda-benda yang dipakai sehari-hari. Adapun motif hias sulaman *kasab* yang digunakan untuk benda-benda perlengkapan upacara adat di antaranya adalah; *tabèng* (tirai), yang merupakan kain lebar yang menutup permukaan dinding atau untuk latar belakang dekorasi. *Neu langet* (langit-langit) untuk menghias bagian atas (plafon). *Ceuradi* (bentuknya berlidah) merupakan perhiasan di atas pelaminan, tirai, di atas kelambu, pintu dan menghias *dalông* (dulang). *Dalansi* (untuk hiasan di belakang pelaminan). *Tampong* (atap), berbentuk segitiga terletak di bagian atas pelaminan. *Bie* (merupakan empat persegi panjang dipakai pada bagian depan atas pelaminan dan tempat tidur). *Panca Soa*, (sejenis *bie* tetapi berkaki dan menyempit di bagian tengah). Tiang pelaminan merupakan hiasan pada pintu masuk pelaminan. *Tika duek* (tikar tempat duduk) pengantin di atas pelaminan berbentuk empat persegi dan ada yang berbentuk empat persegi panjang. *Lapèk tilam duek* (alas kasur tempat duduk) pengantin pada saat menikah atau pada saat makan bersama. Bentuknya empat persegi panjang, di atasnya dialas *tika duek* (tikar alas duduk).

Selain itu perlengkapan adat yang terbuat dari *kasab* adalah *tampok bantai* (mata bantal) yaitu hiasan pada bagian ujung bantal dan bantal guling, yang dipasang pada kanan kiri pengantin. Juga hiasan pada tempat tidur. *Sarong bantai* (sarung bantal) yang merupakan hiasan untuk menutup postur bantal, *seprei* (kain yang ditata bersusun menghiasi bagian muka tempat tidur). Selanjutnya ada juga *tutop keulumbu* (penutup kelambu) menghiasi bagian depan

tempat tidur, *angkin* (menghiasi pinggiran tempat tidur), *opok-opok* (hiasan gantungan pada pelaminan tempat tidur), *kipah* (kipas) untuk mengipasi pengantin, *rangkok* (hiasan dalam *dalong* (dulang) dan bersusun dengan *ceuradi* (perhiasan di atas pelaminan), *caping* (hiasan dalam dulang) yang mempunyai fungsi sama dengan rangkok. *Bajée* (baju) dan *sileuweu meutunjông* (celana) untuk pengantin juga memakai sulaman *kasab* (benang emas), demikian juga dengan *payong hias* (payung) yang melindungi pengantin.

Sejak tahun 1980, pengembangan sulaman *kasab* meluas, tidak hanya sebatas untuk perlengkapan benda-benda upacara, akan tetapi meluas kepada benda-benda peralatan rumah tangga, kegiatan kesenian, sarana angkutan dan cinderamata. Jenis-jenis benda tersebut adalah berbagai macam sarung bantal (sarung bantal kursi, sarung bantal hias mobil, dan sarung bantal hias tempat tidur). Selain itu juga ada sulaman *kasab* untuk alas tempat tidur, kain hias untuk penari, kain hias untuk pesta, baju hias penari, baju hias ke pesta, dompet, kipas kecil untuk tas atau dompet, kipas kado ulangtahun, hiasan dinding dan hiasan untuk kaca mobil.²

Batasan-batasan sosial dalam masyarakat Aceh khususnya masyarakat Samatiga Aceh Barat, tidak terlalu menyolok. baik masyarakat kota maupun desa, keturunan bangsawan ataupun bukan selama mereka memiliki kemampuan ekonomi untuk mempergunakan sulaman *kasab*, maka tidak ada halangan pemakaiannya. Bagi masyarakat pedesaan yang kurang mampu untuk memiliki sulaman *kasab* sebagai perlengkapan benda upacara, mereka meminjamnya dari kerabatnya yang mampu atau dengan cara menyewa pada PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) ataupun usaha penyewaan lain.

²*Ibid*, hal.30.

Sesuai dengan perkembangan zaman, motif hias sulaman *kasab* ikut mengalami modifikasi-modifikasi dengan cara meningkatkan motif-motif hias masa lampau dan menciptakan kreasi-kreasi baru ke dalamnya. Para pelanggan (pembeli) sulaman *kasab* lebih menyukai motif hias yang berbentuk ukiran dibandingkan dengan motif bunga. Alasan para pembeli tersebut karena motif bunga menyerupai sulaman benang emas dari daerah Sumatera Barat, sedangkan motif ukiran (seperti *sulu bayong* dan *awan meu ikôt*) merupakan ciri khas ragam hias Aceh.³

Di Kabupaten Aceh Barat ditemui beberapa desa yang terkenal keberadaannya karena kerajinan sulaman *kasab*. Desa tersebut di antaranya adalah Gampong Teungoh, Gampong Cot, Kuala Bubon, Suak Raya dan Samatiga. Kecamatan Samatiga ini dikenal secara luas meliputi batas-batas kewilayahannya karena keberadaan pengrajin *kasab*.

Industri Kecil dan Usaha Meningkatkan Kewiraswastaan

Kerajinan adalah usaha produktif di sektor non pertanian, baik merupakan mata pencaharian utama maupun mata pencaharian sampingan. Karena itu adalah kegiatan ekonomi, maka usaha kerajinan dikategorikan industri. Dilihat dari cara berproduksi dan besarnya kegiatan, maka usaha kerajinan masih belum memasuki tingkat pabrik, dan baru pada tingkat kerajinan rumah tangga dan industri kecil.⁴ Menurut Sensus Industri 1974/1975 yang disebut kerajinan Rumah Tangga

³ Wawancara dengan Hidayati DA, Pengrajin Sulaman *Kasab* desa Gampong Teungoh, Kecamatan Samatiga Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2000.

⁴ Soeri Soeroto, "Sejarah Kerajinan di Indonesia", dalam *Prisma* No.8. Bulan Agustus Tahun 1974/1975.

memperkerjakan 1 - 4 orang tenaga kerja, sedangkan industri kecil mem-perkerjakan 5 - 19 orang tenaga kerja.

Pada umumnya, seorang pengusaha industri kecil kerajinan sulaman *kasab* ini memiliki tenaga kerja pengrajin 14 - 25 orang. Para pengrajin ini bekerja secara bebas namun terikat. Maksudnya, pengrajin tersebut bebas menerima untuk menyulam *kasab* pesanan dari pengusaha kerajinan manapun atau pelanggan lain, akan tetapi apabila pengusaha yang sering memberi order untuk menyulam pesanan pelanggannya membutuhkan perlengkapan upacara adat dalam waktu dekat, maka pengrajin tersebut berusaha untuk menyelesaikan pesanan itu.

Kerjasama yang menguntungkan antara pengusaha kerajinan *kasab* (pemilik modal sekaligus pengrajin) dengan pengrajin *kasab* (tenaga kerja), dan kerjasama antara pengusaha dengan pengusaha terlihat pada saat ketika seorang pengusaha kerajinan mendapat pesanan dalam jumlah besar. Pengusaha tersebut berusaha menghubungi pengrajinnya dan pengusaha lainnya untuk menyelesaikan segala pesanan.

Cara pembayaran gaji (upah) kepada tenaga kerja (pengrajin) sulaman *kasab* dihitung berdasarkan banyaknya benang emas yang dihabiskan oleh tenaga kerja tersebut untuk menyulam. Hal ini disebabkan, karena umumnya pengusaha kerajinan tersebut telah menyediakan semua kebutuhan untuk menyelesaikan satu pesanan pelanggan. Misalnya, untuk membuat sebuah *bie* diperlukan kain beledru, jarum, benang, manik-manik dan *kasab* sejumlah 15 *unting* (15 gulungan benang). maka pengusaha mengeluarkan modalnya untuk membeli semua keperluan tersebut. Setelah kain dilukis dengan motif hias, kemudian diserahkan kepada tenaga kerja pengrajinnya. Satu *unting kasab* dibayar sejumlah Rp.1.500 (seribu lima ratus

rupiah)⁵ sedangkan untuk memasang manik-manik 1 meter Rp.1.000 (seribu rupiah). Dalam satu bulan, seorang tenaga kerja pengrajin *kasab* menghabiskan sebanyak 100 *unting kasab*.

Tenaga kerja yang menjadi pengrajin *kasab* tidak selamanya menerima upah dari pengusaha kerajinan *kasab*. Apabila mereka mempunyai modal, maka mereka suatu saat akan menjadi pengusaha juga sebagaimana pengusaha-pengusaha yang ada sekarang, yang mana pada awalnya mereka juga hanya tenaga kerja pengrajin saja.

Sebagai wiraswastawan, pendidikan formal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan kerajinan yang ditangani agaknya tidak banyak berpengaruh. Pengelolaan usaha oleh pengrajin yang berpendidikan SLTA (Sekolah Menengah Umum) tidak berbeda dari mereka yang tidak bersekolah. Tidak dilakukan pembukuan yang teratur, tidak ada neraca untung rugi atau penghitungannya, dan tidak ada pemisahan antara modal usaha dengan kekayaan pribadi. Kalau mereka mendapat uang lebih sebagai laba, uang itu di investasikan dalam bentuk emas karena emas diartikan sebagai simpanan atau cadangan sekaligus dapat meningkatkan status sosial mereka. Percaya mempercayai dalam transaksi cukup dominan daripada berdasarkan pada perjanjian tertulis. Akibat dari hubungan saling percaya tersebut, maka antara pengrajin *kasab* dengan para pelanggan (pembeli) sulaman *kasab* ada yang menjadi saudara angkat. Dan kalau tidak bernasib baik, maka kerugianlah yang akan dialami oleh pengrajin *kasab*. Hal ini disebabkan karena pelanggan menghindar untuk melunasi bayaran dari barang yang telah diambilnya.

⁵Wawancara dengan Hidayati DA, Pengrajin Sulaman *Kasab* desa Gampong Teungoh Kecamatan Samatiga Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2000.

Umumnya pembeli yang menjadi langganan tetap adalah para perias pengantin, yang juga mempunyai usaha menyewakan pelaminan adat Aceh. Menurut seorang informan, dalam memasarkan sulaman *kasab* kepada pelanggan yang baru dikenal, faktor keberanian (nekad) harus diterapkan. Hal ini sesuai dengan pengertian wiraswasta yang secara etimologis berasal dari kata *wira* dan *swasta*. *Wira* berarti berani, utama dan perkasa. *Swasta* merupakan paduan dari dua kata *swa* dan *Sta*. *Swa* artinya sendiri sedangkan *sta* berarti berdiri. Dengan demikian, *swasta* dapat diartikan sebagai berdiri sendiri menurut kekuatan sendiri.⁶

Sikap pengrajin sulaman *kasab* dalam menumbuhkan wiraswasta terlihat dalam hal-hal sebagai berikut; *pertama*, dengan berusaha sendirian sebagai pengrajin berdasarkan kemampuan berarti membebaskan diri dari ketergantungan pada orang lain. *Kedua*, Hasrat berusaha timbul karena melihat orang lain juga berusaha dengan mengikuti penyuluhan keterampilan. *Ketiga*, Menekuni pekerjaan menyulam *kasab* dapat menolong dirinya dan keluarganya tanpa meninggalkan pekerjaan pokoknya. *Keempat*, berusaha dengan kerajinan *kasab* dapat mengangkat martabat (harga diri) dalam masyarakat. Dan *kelima*, para pengrajin berusaha berprestasi dengan membuat barang-barang kreasi dan modifikasi baru yang disukai oleh pelanggan.

Produk-produk kerajinan *kasab* yang bermutu baik dari segi kerapian keindahan maupun motif sangat terbatas jumlahnya. Kekurangan modal dan tenaga

⁶Wasty Soemanto, *Pendidikan Wira-swasta*, (Bina Aksara: Malang, 1984), hal.42.

Sri Wahyuni, S.Sos adalah alumnus SMA Negeri 3 Banda Aceh tahun 1992, kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Isipol, Program Studi Antropologi, Universitas Hasanuddin Ujung Pandang dan lulus pada tahun 1996. Sejak tahun 1997 bekerja sebagai staf Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

terampil yang cukup untuk membimbing pengrajin yang mengerjakan sulaman *kasab* merupakan faktor penghambatnya.

Penutup

Di pedesaan Aceh banyak dijumpai kaum perempuan berperan ganda. Di mana satu sisi mereka merupakan ibu rumah tangga dan di sisi lainnya mereka juga turut menyumbang pendapatan ekonomi keluarga. Salah satu contohnya adalah para pengrajin *kasab* di Kecamatan Samatiga Aceh Barat. Mereka umumnya adalah ibu rumah tangga, remaja putri (baik masih bersekolah maupun putus sekolah) dan bahkan anak Sekolah Dasar juga turut ambil bagian sebagai tenaga kerja dalam usaha industri kecil ini.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Pujiwati Sayogyo bahwa perempuan pedesaan umumnya bekerja bukan saja sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga harus melakukan pekerjaan dalam membantu mencari nafkah. Ini berarti perempuan pedesaan mempunyai tugas rangkap, yaitu kegiatan rumah tangga dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan keluarga.⁷

Kerajinan sulaman *kasab* yang tergolong ke dalam industri kecil, dapat menguntungkan apabila dikembangkan secara sungguh-sungguh dan didukung oleh faktor modal serta latihan ketrampilan yang terus berlanjut. Kerapian serta motif-motif yang berseni tinggi akan turut serta mendorong perkembangan kerajinan sulaman *kasab*. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan semangat kewiraswastaan di kalangan masyarakat desa.

⁷Pujiwati Sayogyo, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 22.

Dinamika Masyarakat Pedesaan Sebagai Sumber Daya Sosial Budaya

Oleh: Titit Lestari

Stereotip mengenai masyarakat desa seringkali dipandang sebagai masyarakat yang serba statis, pasif, fatalistik, dan dikuasai oleh sindrom kemiskinan.¹ Hal ini berbeda dengan masyarakat perkotaan yang lebih bersifat individualis, ritme kehidupan yang cepat membuat mereka lebih menghargai waktu, jalan pikiran yang rasional, kemungkinan mendapat pekerjaan lebih banyak, perubahan sosial yang lebih nyata karena mudahnya menerima pengaruh dari luar.² Masyarakat pedesaan sering disebut sebagai masyarakat tradisional, karena masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat. Tetapi dewasa ini masyarakat pedesaan sudah mulai terbuka dengan berbagai informasi dari luar (kota), walaupun masih tetap kuat dalam memegang tradisi adat-istiadat mereka.

Soerjono Soekanto (1990: 168), menyatakan bahwa warga masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat desa lain. Golongan-golongan tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta nasehat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kelemahannya adalah bahwa golongan tua ini mempunyai pandangan yang didasarkan pada tradisi adat-istiadat yang kuat, sehingga sukar untuk

¹ Sartono Kartodirdjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hal. 148.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 170-171.

mengadakan perubahan-perubahan yang nyata.

Pengendalian sosial masyarakat terasa sangat kuat, sehingga kebebasan individu sangat sukar untuk dikembangkan. Dalam masyarakat pedesaan, desas-desus sering kali berperan sebagai alat komunikasi yang *significant* dan biasanya lebih banyak bersifat negatif. Sedangkan dampak positif dari sistem komunikasi yang sederhana tadi adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain dapat diatur dengan seksama. Rasa persatuan erat sekali, yang kemudian menimbulkan saling mengenal dan saling menolong yang akrab.

Kondisi masyarakat pedesaan seperti di atas merupakan salah satu wujud kebudayaan masyarakat pedesaan. Kehidupan masyarakat pedesaan lebih bersifat sosial karena dipengaruhi oleh *ways of life* (cara hidup). Mereka saling tolong-menolong dan tidak bersifat individu. Kondisi ini dipengaruhi oleh cara hidup mereka dalam hal mata pencaharian, misalnya dalam hal bertani yang memerlukan sikap gotong royong dalam mengerjakan tanah serta pekerjaan lain. Sehingga mereka terbiasa dengan kerja kelompok dan merasa senang sepenanggung-an.

Masyarakat pedesaan yang merupakan salah satu kelompok sosial, walaupun lambat tetapi mereka mengalami perubahan dan perkembangan.³ Proses perubahan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh akibat dari proses formasi ataupun proses reformasi.⁴ Bila dibandingkan

³ *Ibid*, hal. 179.

⁴ *Ibid*.

dengan masyarakat perkotaan, dinamika masyarakat pedesaan ini memang lebih lambat, hal ini terjadi karena aliran informasi yang lambat dan keterbukaan mereka terhadap informasi yang kurang.

Daerah Aceh yang di sebut sebagai Serambi Mekkah merupakan daerah yang mewarisi nilai-nilai agama Islam sebagai agama mayoritas penduduknya. Cerminan nilai-nilai agama terekspresikan dalam budaya mereka sehari-hari. Ada pepatah Aceh yang mengatakan bahwa *hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut* yang artinya hukum dengan adat seperti zat dengan sifatnya yaitu tidak terpisahkan.⁵ Eratnya hubungan antara agama dan budaya membentuk fenomena khas di daerah pedesaan yaitu munculnya *dayah-dayah* (pesantren tradisional) dan diadakannya *meunasah* (surau) sebagai pusat kegiatan sosial bagi warga desa.

Alim ulama dalam masyarakat Aceh biasanya disebut dengan *teungku*. Sebutan ini sering diberikan pada seseorang yang telah dan sedang menempuh pendidikan di *dayah* (pesantren). Dalam perkembangan selanjutnya, kaum ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan agama yang dalam dan luas serta memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat.⁶ Para *teungku* umumnya adalah pemimpin *dayah* (pesantren). Kepopuleran seorang ulama bukan saja karena kesalehannya dan berilmu tinggi, akan tetapi karena sanggup memimpin masyarakat.⁷

Teungku sebagai guru mengaji atau pemimpin *dayah* biasanya merupakan tokoh yang kharismatik. Ia menjadi tokoh panutan

bagi muridnya maupun masyarakat desa di sekitarnya. Dengan adanya suatu *dayah* di desa, akan memberikan rasa bangga pada masyarakat desa tersebut, karena mempunyai ulama kharismatik yang memimpin *dayah*. Kondisi ini memunculkan sifat loyalitas yang tinggi dari warga masyarakat terhadap tokoh ulama ini. Selain dari masyarakat sekitar, loyalitas para *santri* (murid) juga tidak diragukan lagi.

Peranan ulama sebagai mobilisator masyarakat pedesaan juga pernah dimanfaatkan oleh Sultan Mahmud Syah, penguasa Kerajaan Aceh Darussalam untuk melawan Belanda pada tahun 1873. Sultan Mahmud Syah mengkonsolidasi kekuatan rakyat dengan melalui kekuatan para ulama.⁸

Selain peran kepemimpinan, dinamika masyarakat pedesaan juga dipengaruhi oleh ideologinya. Seperti diungkapkan oleh Sartono Kartodirdjo, bahwa ideologi perang sabil menonjolkan penolakan rakyat muslimin terhadap pemerintahan kaum kafir, serta perubahan-perubahan yang menyertainya.⁹ Pada jaman dahulu dikobarkan semangat perang sabil untuk melawan penjajah kafir, sedangkan pada saat sekarang masyarakat pedesaan mulai bersemangat untuk melawan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM harus diperangi dimanapun berada. Dalam masyarakat pedesaan Aceh, pelanggaran HAM seakan tiada henti menerpa kehidupannya. Dalam situasi di mana rakyat mengalami keresahan sosial dengan sendiri ideologi itu mampu melepaskan kekuatan *latent* yang dahsyat mendorong rakyat bergerak.¹⁰ Ideologi yang dimaksud di sini adalah keyakinan rakyat akan sesuatu teori atau faham. Jika masyarakat pedesaan mulai merasakan hidupnya tidak nyaman dan terganggu akan memunculkan jiwa berontak dan melawan ketidakadilan yang ada.

⁸ *Ibid*, hal. 33.

⁹ Sartono Kartodirdjo, *Ibid*, hal 158-159.

¹⁰ *Ibid*.

Kekuatan inilah yang dapat mendorong rakyat untuk melakukan gerakan yang dahsyat.

Dinamika masyarakat pedesaan merupakan suatu sumber daya sosial yang cukup potensial. Kelompok masyarakat pedesaan yang memiliki budaya kekerabatan dan solidaritas yang tinggi terhadap warganya merupakan aset yang dapat diberdayakan untuk tujuan tertentu. Besarnya pengaruh pemuka masyarakat dalam pembentukan kepribadian masyarakat desa dan diadakannya tokoh masyarakat sebagai tokoh yang harus di hormati dan di dengar nasehatnya merupakan suatu gejala bahwa gerakan sosial masyarakat setempat mudah dikendalikan. Kekuatan mereka yang sentralistik dan terletak pada tokoh masyarakat sangat mudah untuk dikendalikan. Kondisi seperti inilah yang merupakan potensi besar untuk dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang berguna bagi pembangunan desa selanjutnya.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya masyarakat pedesaan dapat digerakkan atau dimotivasi untuk melakukan sesuatu. Adanya pemimpin, keyakinan (ideologi), dan kelembagaan merupakan suatu potensi yang dapat digunakan untuk menggerakkan kekuatan sosial yang dahsyat. Dinamika masyarakat pedesaan yang seperti di atas merupakan suatu sumber daya sosial budaya yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan maupun penyelesaian konflik yang ada. Pada kondisi akhir-akhir ini, mulai berkembang peradilan rakyat yang kadang-kadang jauh dari rasa adil itu sendiri. Peristiwa pembakaran pencuri sepeda motor oleh massa hingga tewas merupakan salah satu contoh bahwa peradilan rakyat jauh dari rasa keadilan itu sendiri. Untuk menghindari hal-hal yang demikian maka sumberdaya masyarakat pedesaan dapat dimanfaatkan

yaitu dengan cara mengoptimalkan peranan orang atau tokoh yang disegani warganya untuk mengatur atau menghimpun mereka agar tidak berbuat yang kurang adil serta meningkatkan keyakinan akan suatu kebenaran yang bijaksana dan mengoptimalkan fungsi kelembagaan yang ada pada masyarakat desa.

Selain untuk menghindari hal-hal yang bersifat kriminal, dinamika masyarakat di desa dapat juga di arahkan untuk pembangunan suatu daerah. Misalnya menggerakkan kekuatan massa untuk menjaga atau melindungi desanya dari pengaruh luar yang dapat menimbulkan kekacauan bagi desanya. Jika tiap desa mempunyai tokoh yang dapat dijadikan panutan dan dapat dipercaya, maka segala bentuk masalah akan dapat dengan mudah diselesaikan oleh warga desa sendiri. Tetapi jika tokoh masyarakat yang menjadi panutan tidak dapat dipercaya lagi oleh penduduk desa, maka akan terjadi gerakan massa yang tidak terarah yang akan berakibat fatal.

Sudah semenjak masa kerajaan, masa penjajahan dan hingga kemerdekaan para ulama selalu mendampingi para pemimpin formal (*umara*) dalam melaksanakan pemerintahan, mulai dari unit pemerintahan tertinggi (kesultanan) hingga unit pemerintah-an terkecil yang disebut *gampong* (kampung/desa).¹¹ Setelah masa reformasi dan dengan belum terselesaikannya konflik di Aceh apakah peranan ulama masih seperti pada jaman sebelumnya. Apakah dengan kondisi seperti sekarang ini memungkinkan penyelesaian masalah konflik intern pedesaan khususnya dapat diselesaikan dengan mengandalkan pembenahan pada tiga unsur utama yaitu kepemimpinan, ideologi dan kelembagaan pada masyarakat pedesaan ?

¹¹ *Ibid.*, hal 1.

⁵ Nasruddin Sulaiman, dkk, *Aceh: manusia masyarakat Adat dan Budaya*, (Banda Aceh: PDIA, 1992), hal. 10.

⁶ Rusdi Sufi. dkk, *Peranan Tokoh Agama dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945 - 1950 di Aceh*, (Jakarta: Proyek ISDN, Depdikbud, 1997), hal. 7.

⁷ *Ibid*.

Titit Lestari, S.Si adalah alumnus SMA Negeri I Lumajang pada tahun 1990, kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Geografi, Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus pada tahun 1997. Sejak tahun 1998 bekerja sebagai staf Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Haba Nyak Amat Lagak

Cerita dibawah ini mengandung hikmah bahwa dalam menilai seseorang hendaknya tidak melihat penampilan luarnya. Seperti halnya Nyak Amat Lagak, dari penampilannya dia adalah orang kaya dan hartawan padahal pekerjaan sehari-harinya mengadu ayam.

Bak siuroe teukeudi bri tuhan, si Nyak Amat nyan jih na umu 8 thôn. Bak saboh gampông nyan na saboh rumoh sikula SD. Teuma si nyak Amat nyang beuhubông jih sidroe aneuk gasien miseukin, hana geueuntat bak sikula. Teutapi beuhubông jih sidroe aneuk ceureudek, jijak jiduek-duek, jidong bak pintô, jikalon gob teumuléeh. Jituléeh digob jituléeh dijih. Hingga bak hingga, bak sithôn dua thôn dijih ka jeuet teumuléeh, kana bak diteumuléeh-muléeh bak si ôn keureutah deungon kènsè, sampoe jeuet dituléeh nan droe jih. Jibôh droe nan Nyak Amat Lagak. Teuma kakeuh, ka tayek juh, jiseutèt-seutèt ma jak u peukan, geujak meukat-meukat atawa geujak bloe barang geupeudi bak jih, na bak jih jiteumée sikrek kènsè mirah. Rayeuk kènsè nyan beurupa gapu. Kakeuh bak jijak-jak, bak jidong-dong bak toko gob, jituléh teuk nan Nyak Amat Lagak, jituléh. Jadi ureueng po keudè nyan hana geupeuduli. Dijak bak keudè laén meunan cit, jijak bak toko laén meunan cit. Nayak Amat Lagak na. Hasée bandum jituléh Nyak Amat Lagak. kakeuh grak teukeudi bri tuhan, rayeuk jih. Jih ka maté yah ka maté ma. Umu kira-kira 15 thôn. 'Oh lheuehnyan kajipilhée keunoe jipikhé keudèeh, peudaya lôn mita raseuki, lôn yah pih hana lé, ma pih hana lé.

Leumah teuk akai bak jih, nyoe bah keuh kubloe manok agam saboh kupeulôt-peulôt ngon Cina. kakeuh dijih kanan pèng bacut, dibloe sipatu saboh nyang yum limong ribée, bajée pih wol., leuweue pih wol. Pèng tan meusiblah bak badan jih. Kakeuh peulô-peulôt manok ngon Cina. Asay ka jipeulôt ka meunang, sabée meunang. jadi jih jikalon uléeh ureueng laén, Oo..., ma hébat that Nyak Amat Lagak. Patôt jih jibôh nan Nyak

Amat Lagak. Rupapih lagak, bajée pih lagak, jih bajée sifeuet nyan thok-thok sipasang. Bhan jiwow jisuet bajée nyan jikubah dijih. Karayeuk lom, bhak jak peulôt-peulôt manok. Dak masanyo disinoe di daerah Ulee Lheueh dijak peulôt manok, dijak tamong u pelabuhan jiceue lé Nyak Amat Lagak. Jadi aneuk pasai hana jipeuduli, jadi ban saboh diceue Nyak Amat, jituléh-tuléh. Jadi bak si uroe jimeuturi ngon sidroe aneuk inong. Aneuk Inong nyan aneuk toke meukat meuh, tak ubah aneuk toke meukat meuh di peukan. Kakeuh, watée meuturi jikheun : Peu dek tameukawen dua. Seuôt aneuk nyan, dilôn han lôn téem Bang Amat ngon droe neuh, keurana lôn ka ureueng kaya that, keureuna ho-ho nyang lôn jak u Lhée Lheue loon kalon kapay-kapay droe neuh, na kapay 10 boh, lé nyan.

Teuma kakeuh dijih ka jilakée meukawèn ngon aneuk nyan. Dalam jilakémeukawèn nyan jitanyong bak aneuk nyan. Teuma peue dèk katèm ?, Meunyo ka tèm ka jaweueb ka tèm, meunyo han ka hana raseuki lôn. Bèk ka lakèe ateueh nama lôn kaya, kadang-kadang 'oh uroe singoh jatôh gasien. Meunyo katèm ka na raseuki lôn. Lôn tèm bang Amat, dikheuen. Meunyo ka tèm hai dèk meutuwah, kawoe kaci mupakat ngon ureueng chik kah dan ngon pamili kah bandum, bèk ka peugah lôn nyang bahwa sidroe ureueng kaya, beuthat beulèue kapay, kapay nyan uroe nyoe bisa karam, toko nyan uroe nyoe bisa tutông. Kaci mupakat. Kakeuh jiwoe laju jimupakat ngon ureueng chik nyan toh na bang Amat Lagak. Nyang toh Bang Amat Lagak? toko-toko nyan atra gobnyan bandum. Ka jeuet meunyo meunan. Lheuh keupeugah lé ma bak ayah jih. Hai nyoe aneuk geutanyoe na ureueng alkèe,

nyang lakèe nyan Nyak Amat Lagak. Meunyo han tatèe ngon nyan kapeugah bak gata syit ka kon lé. Seudangkan toko nyan ateueh nama toko jih bandum, dan kapay ateueh nama kapay jih mandum. Nyoe kupeugah bak gata padum tatueng jeunamè. Kakeuh hai yah jih, tatèm. Man meunyo tatèm jeunamè jih padum ?. Hai meunyo jeunamè keupeu jeunamè lagée haba beuno, meung saboh kapay jih mantong han éh tabôh yum. Keupeue tajak tueng jeunamè, meunyo ta peugah jeunamè jipeuwoe kapay-kapay euntreuek. Bèk tatueng jeunamè, keu jih lom tajak.

Kakeuh, bhan jiriwang aneuk inong nyan : Bang Amat !, ma ka geutèm, teuma jeunamè hana peu bang Amat. Geupeugah lé yah bèk euntreuek geupeugah jeunamè nyan, keu droe neuh geujook lom. Ka keuh bhan lheueh nyan, jeunamè hana. Ka keuh pèh goong pèh canang Nyak Amat nyan. Meungnyo meunan kheun tuan, ngon nikah ngon gatib ngon uowoe sigoe. Ma di gata bhak khanduri bèk sapeue, berhubung hana lé yah dan hana lé mak. Mengenai bubé na tamu gata jeuet tamè keunoe bandum, lonn nyang khanduri. Teuma meunan cit ateueh nama loon bri keu gata salén linto, cok meuh nyoe pat bak loon 30 manyam. Gata bèk tapuwoe sapeue, hana guna tajak puwoe bajée, hana loon tém. Ka keuh si Nyak Amat nyan kon ka glah lom langkah, hai jih kana meuh trook bak lhée plooh manyam. Ka keu ka lheueh jimeukawén. Dijih cara pèng jih hana oon jameun, oon grak-grik. Na pèng dijih saboh blèt. Kon pèng, labang grang-gring.

Ka keuh watée lheueh meukawén ka lheueh ék linto dum peue jih buet jih peuloot manok teutap tiep-tiep thoon. Ka panyang bacut ka raya lom tarooh. Rumoh bapak nyan, rumoh tuan jih that raya. Ka keuh diloon hareukat, hanale diloon buet nyan, ayah keuseunangan, nyang mita pèng cit-cob. Diloon hana hareukat. Ka jeuet. Kakeuh si Nyak Amat beungoh uroe jicok bajée, kana mupadum pasang, berhubung ka jijook meuh lé tuan, ka jijak bloe lom bajée.

Kakeuh ban diwoe si Amat jak peuloot manok dèk buka pintoo, dèk buka pintoo, cut abang ka woe hai adék ku jak meusaboong. Ku 'uek lé manok si jareng Cina. Ku'uek'uek, jibuka pintoo lé adék.

Kakeuh ka teukeudi Tuhan bri, diikat manok, di sinan na guci saboh, leupah raya guci nyan, guci meueh. Kakeuh grak teukeudi Tuhan bri, manok nyan dikireueh-kireueh sabé. Dijih meung ka malam jikheun bak inong. Diloon dèk asay malam tajook kama khusus diloon saboh, keureuna dilon malam loon keumira sabé, kapay toh nyang goh jitamong, toke toh nyang goh jijook wasée, nyan keuh buet loon. Jadi loon lheueh bu neujook aneuk gunci sineuek loon tamong lam kama. kama loon bèk tamong-tamong gata, nyan kama kusus. Kajeuet bang. Di jih na pèng saboh kalèng, kon pèng, la bang, jo gok-gok lé, alah limong blaih juta treuk pèng, seudangkan ija pulikat peureulée 10 kudoe treuk. Toko jéh gohlom jijook wasée, meunoe geugini, meunoe beugitu, digring-gring lé pèng nyan. Ka keuh siinong galak that haté, dituan jih pih meunan cit.

Jéh hai neukalon jéh lakoe jih di dalam, jéh pèng 17 juta meunoe geugini, meuno beugitu dikheun. Bak budek bak até gata nyan loon bileueng-bileueng bunoe le pèng, hana lé pèng 10 juta. Teuma nyoe peureulée that pèng diloon peuet juta, berhubung kapay hana jitamong. Man cipeugah bak yah siat, peue ék na pèng siat meu 15 uroe. Kru seumangat aneuk meutuah, bèk 'an sidumnan, le nibak nyan loon jook. Singoh kadang-kadang ayah ditamong kapay, paih pulak, ban singoh nyan dijih ka jiteupeue sabé, asay uroe Seunin ka jitamong kapay nyan, asay uroe Seulasa ka jitamong kapay jéh, ka titupeue bandum.

'Oh lheueh nyan, jipulang, nyan ayah ka jitamong kapay ka geubayeue bandum. Kakeuh tréb bak tréb dijih asay diwoe jak peuloot manok, manok diikat bak guci nyan. Bak siuroe manok jikireueh-kireueh, sampé meubuleuen, sampoe meuthoon. Bak siuroe ka lhook than bak

jikireueh nyan, dheueh teuk meueh saboh cak, raya dheueh meueh, bak jikireueh lé manok, dikalon lé inong, kakeuh di ék teuk inong jih. Bit nyoe droe neueh bang ék neupeugeuet loon. Adak meudéh bék lagée nyan, meudéh 'oh na barang atawa pèng lagée nyan, keubah bak loon peue neujak tanom lam tanoh. Di si Amat ka beungèh jih, bak atée jih ka teubuka rahasia ka jiteupeue bahwa pèng jih labang. Peue kupeungeuet kah, meunoe-beugini meunoe-beugitu. Kon ék na meueh neujak tanom jéh pat, bak biéh guci, pat ku tanom jak cok. Peu neuyue jak cok, jéh pat ltheueh neutanom bak biéh guci ka neuyue jak cok. Nyan hai. Ban jico jikalon lé si Amat meueh nyan lé. Han jeuet tasom sapeu bak ureueng inong. Pane geujak peulemah, cit ban saboh nyan ka geujak tanom, hana kateupeu dikah. Diloon hana kujak peuleumah kaya nyan, ban saboh nyan kalheueh ku tanom. Kakeuh beudieh yah tuan jak cok meueh nyan. Alah hai aneuk meutuah keupeu tajak tanom meueh nyan di sinan.

Kon ayah, sibeuna jih kon meueh di sinan loon tanom, leupat kaloon tanom. Cuma diloon han loon peugah-peugah, ka atée neucok kakeuh, nyoe sibeuna jih meungnyoe ka neutupat loon tuan tanom nyan ka payah loon tuan publoe. Sabab barang nyan hanjeuet gob teupeu, barang penteueng.

Kakeuh si Nyak Amat kon kaya laju treuk dijih, kaya laju. Ban kaya, jih teutap peuloot manok. Peulot manok jibeudhoe dibloe treuk moto impala saboh. Nyan adak geudoot-dhoot lé ayah ka jeuet ka ltheueh ku bloe moto impala, kano saboh. Nyoe keuneuk peungèt rumoh geudong lom.

Kakeuh bak siroe dijih jijak lom kakeuh jijak dak basa jinoe keudeh u Sigli jijak. Ma lé buleuen jijak peusabong manok. Ban jijak jikheuen bak ayah : hai ayah loon, loon jak beu ék seulamat, leuph teuingat diloon keudroe neuh. Geuseuoot ayah : hai aneuk meungnyoe tajak diloon, loon bi, teuma doa bak loon beuseulamat, beutaingat keu loon ka tuha. Diseuoot lom aneuk : hai

ayah neucok bulooh. Ayah keuruti aneuk...neureuk sutra. Loon kheuen siroe pih han loon jeuet kheun, loon kheun sibuleuen pih han loon jeuet kheun, meunan ji kheun bak inong jih.

Alhamdulillah bang meungnyoe ka neujak beueuk seulamat, beuna neuingat keu loon nyan mantong muda. Got dék.

Kakeuh ban beungoh beudoeh, ék geuritan apui beurangkat u Sigli. 'Oh ban trooh u Sigli leubèh kureueng na si buleuen, peulot manok meukeupong ltheueh. Menang sabé manok jih. Kakeug pèng jipuwoe saboh taih raya.

'Oh ban jiwoe jih jikheuen : buka pintoo dék e, buka keudroe cut abang. Ka kuwoe dék kujak meusabong ngon manok si jurang Cina.

Jadi inong ph cukop lagak, jiseuoot teukinong jih han jeuet loon buka hai abang droe peudeueng meulinteung bak takue droe.

Ka jimoe si Amat, keureuna ka jitamong agam laenurumoh, meungnyoc ka buka dikah pintoo kah putoih takue.

'Oh ltheuehnyan jikheuen lé si Amat nyan lom, buka pintoo adék, buka keudroe abang. Jitiek lé manok lé si Amat u cong buboong, ka jiku'uek. Diseuoot lom inong : han jeuet loon buka abang, peudeueng meuliteueng bak takue adoe. Ban jikheuen lagée nyan si Amat meuglueng-meuglueng ka pangsan. Ka pangsan si Amat, diinong pih ka pangsan. Kira-kira na dua jeuem ka pangsan jiteubiet lakoe dijak kalon si Amat kakeuh pingsan, lakoe nyang jak peukarue inong si Amat, seudangkan ayah si Amat ka geujak gobnyan. Ureueng kaya jak me'u'en-me'u'en keudéh, ka jiperkosa aneuk gobyan. Kakeuh di si Amat dalam dijih pangsan kajipeulumpoe, leumah lam lumpoe nibak ureueng chik agam dan ureueng chik inong : hai Amat namun inong kah ka diperkosa lé gob, namun inong ka suci mantong. Teuma hana peue dikah, nyang jih teutap tanyoe poe. 'Oh ltheuehnyan treuk teukeujoot jih, lampreuk teukeujoot jih bunoe : meunoe kapeulaku, peue ku peulaku, booh ka jeuet.

'Oh ltheuehnyan teuingat dijih rupa jih kheun ma jih : inong kah walaupun ka dipeukosa, namun inongkah teutap mantong suci. Ka peugah bak jih, kayue kheun lom han kutueng lé bang nyan, kayue kheun bak agam muda nyan. Teuma bak ji ék jih u rumoh, jika kalop u jub beulangong beusoe, kheun mak nyan lam lumpoe. Watee agam nyan ka dibibu lé inong kah dipuduek meja keudéh kheun kaduek kah di likoot. Muban ka cukop keudéh keunan kayue to laju ka tak lajue lé kah, kabeudoeh. Kakeuh dibi teuk bu lakoe jih. Ho ka lakoe kah ? Hana lakoe loon, han geutueng lé loon seubab ka neujak droe neuh keunoe, loon han geutueng lé, nyoe cukop mangat kah, dak barang gajan neujak jeuet ka, gobyan hana lé, tanyoe ka dua laju. Kakeuh dihidang treuk bu lé inongnyan dumpeue, na mangat-mangat that. Pajooh treuk bu. Jiteubit treuk Nyak Amat jitak lé. Ban jitak ka maté. Dalam matényan jitimoh sibak bak kayée, teuntang jih maté nyan, jipok rumoh nyan, jipok alue, nan bak nyan bak peuleunggéng, cukoop mamèh boh jih. Kakeuh dianeuk inong nyan dikheun lé si Amat : dék, nyoe pat bang. Meungnyoe na abang jak jeuooh-jeuooh meungnyoe na adék kalon boh peulanggéng nyoe bék adék pot. Gèt, abang. Pakon bék lon pot, meungnyoe hana neusayang kuseurah bak adék. Kakeuh, neupeugah hai abang, hai pakon ? Loon kadang-kadang meuheuet that euntreuk rooh loon pot. Neupeugah kasiat jih pakon keuh bék loon pot. Meungnyoe loon peugah dék bék pot, bék pot. Kakeu tréb bak tréb boh peuleunggéng nyan ka raya. Hana jipot berhubung jih weueh keu lakoe jih, Ma jikheun bak lakoe jih, ma neubloe bang boh peulanggéng keuloon saboh di peukan meungnyo han neubri pot nyoe. Got dék. Bék 'an saboh meusireutooh loon bloe. Kakeuh watee jiyue bloe nyan hana museem boh peulanggéng. Kakeuh jijak keunoe-jijak keudéh, kakeuh hana jibloe. Han ék lé jitheun atee aneuk inong nyan, alah bah kupot saboh, alah peue na geuteupeu lé bang. Jipot treuk saboh jipojooh treuk.

Kakeuh tréb bak tréb diinongnyan jatooh treuk mumée. Ka jatooh mumée jikheun lé Nyak Amat. Hai adék peu na neupajooh boh peulanggéng nyan ? Hana bang, beubeutooy adék peugah hana, apa boleh buat. Meunuroot loon kaloon na adék pot. Na abang loon pot saboh. Alah dék meunyoe na kapot boh peulanggéng nyan, sang loon ngon adék sang toe that untuk berpisah. Kon ka jimoe ? Pakon abang meunan neupeugah ? Cit ka meunan adék, loon ngon adék sang cit ka berpisah kapot boh peulanggéng nyan. Kakeuh ata ka ltheueh jih pot, hingga ka mumé inongnyan gara-gara jipajooh boh nyan. Na aneuk saboh. Watée na aneuk saboh, dianeuk nyan paléng lisék. Kira-kira umue tujooh thoon ka jitupeu dumpu. Di si Amat nyoe, jih ngon inong nyan teutap keuh hana lé toe di éh hana lé sapat. Teuma dipeugah bak ayah, loon ayah teutap utuh ngon jih, teutapi, nyoe nyang bahwa keu loon yah, nyoe kon aneuk loon, aneuk uerueng nyang ka mtée jéh. Teuma aneuk nyan neudidik beugot, neujak bak jalan agama. Teutapi meunuroot ramalan loon, meunyoe rayek loon akan jipajooh, kareuna loon kalheueh loon poh yah jih. Nyoe ramalan loon. Pakon meunan tapeugah ? Cit kon ayah. Memang jih kalheueh jimeuseutubooh ngon jih watée loon di Medan, teutapi loon anggap jih masih bersih han ék dipertahankan, apa boleh buat keureuna dipaksa. Ma loon wasiet bak jih, han loon bi pajooh boh pelanngéng nyan, teutapi jih jipajooh, beurarti jih hana sayang keu loon. Kakeuh lagée haba bunoe aneuk nyan ka rayek. Meunan cit disah bak mak : Di mak nyoe ék sayang keulakoe jih kon sayang keu aneuk. Mak, mak. Mak meungnyoe na neuweueh keu loon, mak meunoe, meunoe neupeulaku. Diureueng inong bagah that jiloo. Booh ji aneuk nyan pih agam, dipeulaku treuk. Ka jipooh si Amat Lagak buet aneuk kira-kira umue gob nyan 9 thoon. Bhan jicok sikrèk kréh dalam leumari plub jitob bak takue ka maté.

(Disadur dari buku Sastera Lisan Aceh, Oleh Drs. Ardy Ahmad, dkk. Proyek Penelitian Bahasa dan Sastera Indonesia dan Daerah D.I. Aceh. Dep P dan K. 1976/1977. Oleh Sri Wahyuni, S.Sos.)